



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ELIT TRADISIONAL DI PANGGUNG POLITIK :
KETERLIBATAN PANGHULU DALAM POLITIK ORDE BARU
DI KABUPATEN AGAM, 1971-1998.**

SKRIPSI



**YOGI YOLANDA
07181027**

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2012**

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Allhamdulillah, Segala puja dan puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Elit Tradisional di Panggung Politik: Keterlibatan Panghulu dalam Politik Orde Baru di Kabupaten Agam”**. Adapun skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Karya kecil ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis Papa Hendarmen Yusuf dan Ibunda Dameti, yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis semenjak dan kecil sampai saat ini. Terimalah ini sebagai bakti kecil ananda untuk Papa dan Ibu, walaupun ananda sadar bahwa ini belum lah sesuatu yang membanggakan. Terimakasih juga untuk kedua adik-adik ku Beni dan Herlin, kebahagiaan kalian adalah impian abang. Terimakasih juga untuk seluruh keluarga besar penulis yang di Sigiran dan di Bayua Terimakasih untuk seorang gadis di seberang lautan yang sedang melanjutkan S2, kasih yang tak terbatas untukmu.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Lindayanti, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Hary Efendi Iskandar, S.S, M.A., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membaca, berdiskusi dan mengkritisi skripsi yang penulis buat. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Israr Iskandar, S.S, M.Si yang telah bersedia dalam membimbing penulis dalam membuat proposal skripsi dan meminjamkan buku-buku terkait judul yang penulis tulis. Terimakasih juga untuk Bapak Zaiyardam Zubir, M.Hum atas bantuan yang telah Bapak berikan dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan Sejarah Drs. Sabar, M. Hum dan Sekretaris Jurusan Dra. Enimay, M.Si, yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis sejak masuk di Jurusan ini sampai sekarang. Melalui lembaran ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada para dosen yang mengajar di Jurusan Sejarah; Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan., Prof. Dr. Herwandi, M.Hum., Drs. Zulqayyim, M.Hum., Drs. Zaiyardam Zubir, M.Hum., DR. M.Nur, M.S., Drs. Nopriyasman, M.Hum., Hary Efendi Iskandar, S.S, M.A., Dr. Lindayanti, M.Hum., Dra Eni May, M.Si., Drs Sabar M.Hum., Witrianto M.Hum., M.Si., Dra. Midawati, M.Hum., Dra. Irianna., Drs. Purwo Husodo, M.Hum., Drs. Armansyah., Drs. Syafrizal, M.Hum., Drs Wannofri Samry, M.Hum., Drs. M. Djuir, Yenny Namy, S.S, M.A., Israr Iskandar,SS., M.SL, Yudhi Andoni, S.S., dan seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Penulis mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pimpinan Fakultas Ilmu Budaya; Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para informan terutama Bapak Saafroedin Bahar yang telah menyediakan waktunya untuk bisa berdiskusi dan menceritakan terkait dengan politik Orde Baru. Terimakasih juga untuk *Angku-Angku* Dt. Maleka Nan Tinggi, Dt. Tumbijo, Dt. Sati Nan Tuo, Dt. Nan Panjang dan seluruh informan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terimakasih yang tulus, penulis ucapkan kepada Keluarga Besar UKM PUP UNAND, para senior: Bang Charles, Bang Feri, Bang Dafit, Bang Putra, Bang Reza, Pak Uwo, Bang nunuk, Bang saiful, Kak Dani, Kak Men dan lain lain. Para pejuang di kepengurusan 2009-10; Anggia, Abenk, Bambang, TG,

Reni, Ramanda, Arif, Ifa, Guntur dan lain-lain. Pejuang di kepengurusan 2010-11 Fian (tetap semangat), Rizki, Fanny, Bang Ryn, Wiko, dan lain-lain. Pejuang di kepengurusan 2011-2012; Ucok(cukur jambangmu cok), Irzi, Intan, Tria, Nela dan lain-lain. Pejuang di Kepengurusan 2012-2013; Chandra(semangat ketua), Agit, mike, ani, satria, Rizki beserta adek-adek anggota muda yang kami banggakan : Yudi, Arifki, andhika, dewi, kuyak, vani, nunuk, gunawan, rido, dan lain-lain.

Terimakasih juga untuk Keluarga Besar PsH, Pak, Pak Zul, Pak Adam, Ajo Hary, Abah (harus labiah dalam gali ilmu abah yang ciek tu), Sopan (kaja fani taruih pan), Cici (yang selalu menjadi inspirasi bang codoik "request"), Dona, Uun, Kak Ana, Sara&Eldo (semoga langgeng), dan lain-lain. Khusus Bang codoik, jan di ratokkan bana kijang yang lah lapeh tu bang. .haha. Bang Toke, capeklah baralek bang beko disemba urang.

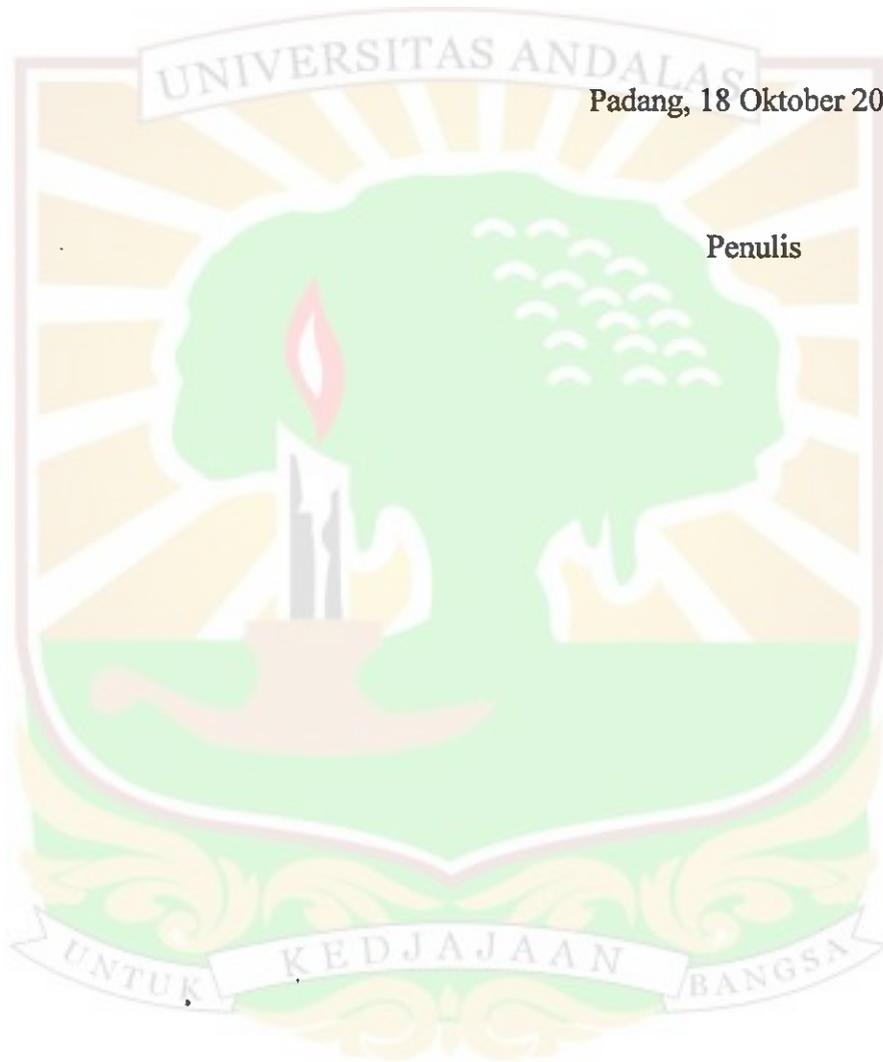
Terimakasih yang tak terhingga kepada kawan-kawan "07 Badunsanak"; Reza(ayun jak), Devra(agiah ndan), Sopan(asal ang sanang den sanang lo..haha), Pak Son (Ldr), Mamak&Tia (Nikah), Aldi(semangat dy), Adhe (Be'), Rio, Codoik, Fandi&Dona(semoga langgeng), Donal&Citra(Capek Baralek), Au, Hilza, Nora, Widi, Ayu, Vitri, Citra, Amel, Dalles, Aulia, Inyik Farhan (samsu pinjaro), Cik uniang, Asri, Wiwid, Fitri, Tius dan kawan2 yang lain. Terimakasih atas persekawanan kita selama ini, semoga abadi selamanya. Salam hormat untuk senior-senior Sejarah (06,05,04,03,02,01 dan seterusnya). Tetap semangat untuk kawan-kawan Sejarah angkatan (08,09,010,011 dan 2012). Khusus Satria Putra (09), serius lah berorganisasi selama jadi mahasiswa dan tetap semangat.

Untuk para sahabat dan kawan seperjuangan sapa-demo-an; Doni alias asyonk (terimakasih atas persahabatan selama in, Aulia Alfacrisy (semoga tidak jadi mafia hukum), Mbah Ganik Haikal, Diki Sikumbang, Aziz, Rudi, Ramanda(selamat pengusaha), Jon Upi, Aldo lain, liham Jn Umsb, Ade Ubh, Wendra, dan semua kawan-kawan LAM&PK, KAKI LIMA, Ampepara, Lima mira, FPP, YC AC KPK RI, kawan-kawan LBH, PBHI dan seterusnya. Terimakasih juga untuk Para Dosen Progresif; Bang Charles, Bang Feri, Ajo Hari, Mas Ve, Pak Adam, Pak Yudhi dan lain-lain. Kawan-kawan KKN Jorong Subarang Parik; Lidya, Rajab, Wulan, Izik dan Puput.

Terimakasih untuk Bang Andrinof Chaniago atas masukan-masukannya. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh penghuni Orange Kos; Devra(Mandan sakamar nan paliang mantap), Kojak (inspirasi kos), Yori. Komandan Dedi Alparezi (abang yang selalu menasehati), Deded, Ibuk dan Apak Kos, Arif, Pak De, Bang Yadi, hanif, zulfa, dayat St pamenan, rusdian, Kanter dan lain-lain. Untuk semua kawan-kawan ku di Komunitas Romanisti Minang dan The Kmer's. Terimakasih untuk hari-hari yang menyenangkan.

Sebagai penutup rangkaian terimakasih ini, ucapan spesial penulis sampaikan pada seorang gadis yang telah mengisi hari-hari penulis dengan kasih dan cinta. Terimakasih atas bantuannya meminjamkan buku-buku yang penulis butuhkan. Terimakasih untuk semua kebahagiaannya Anggia Fardhani.,S.Ip., Tetap semangat dalam meraih gelas master di Universitas indonesia, setelah semua tugas study kita selesai, uda akan menjemput mu kesana. Semoga jalan ini diridhoi Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh Karena itu dengan senang hati penulis menerima saran dan knitik, guna perbaikan dan penyempurnaan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya. Dan Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.



Padang, 18 Oktober 2012

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Elit Tradisional di Panggung Politik: Keterlibatan Panghulu dalam Politik Orde Baru di Kabupaten Agam, 1971-1998. Pasca runtuhnya Rezim Orde Lama yang pada prakteknya sangat tidak berpihak pada elit tradisional. Orde Baru mulai memberikan angin segar untuk keterlibatan panghulu dalam kancah politik. Hal ini menyebabkan bermunculannya panghulu-panghulu yang menjadi aktivis partai politik dan anggota legislatif terutama pada partai Golkar di Kabupaten Agam. Keberadaan mereka dalam dunia politik menimbulkan pertanyaan, apakah mereka memang memiliki kapasitas sebagai pemimpin, atau karena pengaruh yang dimilikinya sehingga dekat dengan pemerintahan Orde Baru.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah keberadaan panghulu dalam dunia Politik Orde Baru. Fenomena ini terasa semakin kuat, ditandai dengan banyaknya panghulu yang terlibat dalam politik, terutama ikut dalam gerbong Golkar. Beberapa panghulu juga bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hal pokok dari metode ini adalah wawancara mendalam dengan berbagai informan dan melalui studi arsip dari koran, arsip pribadi serta merujuk pada buku dan skripsi yang mempunyai kaitan dengan penulisan yang penulis lakukan. Beberapa Informan yang penulis wawancarai adalah DR. Saafroedin Bahar, Yul Arnis DT. Maleka Nan Tinggi, DT. Sati Nan Tuo, Syukirman DT. Tumbijo dan lain-lain.

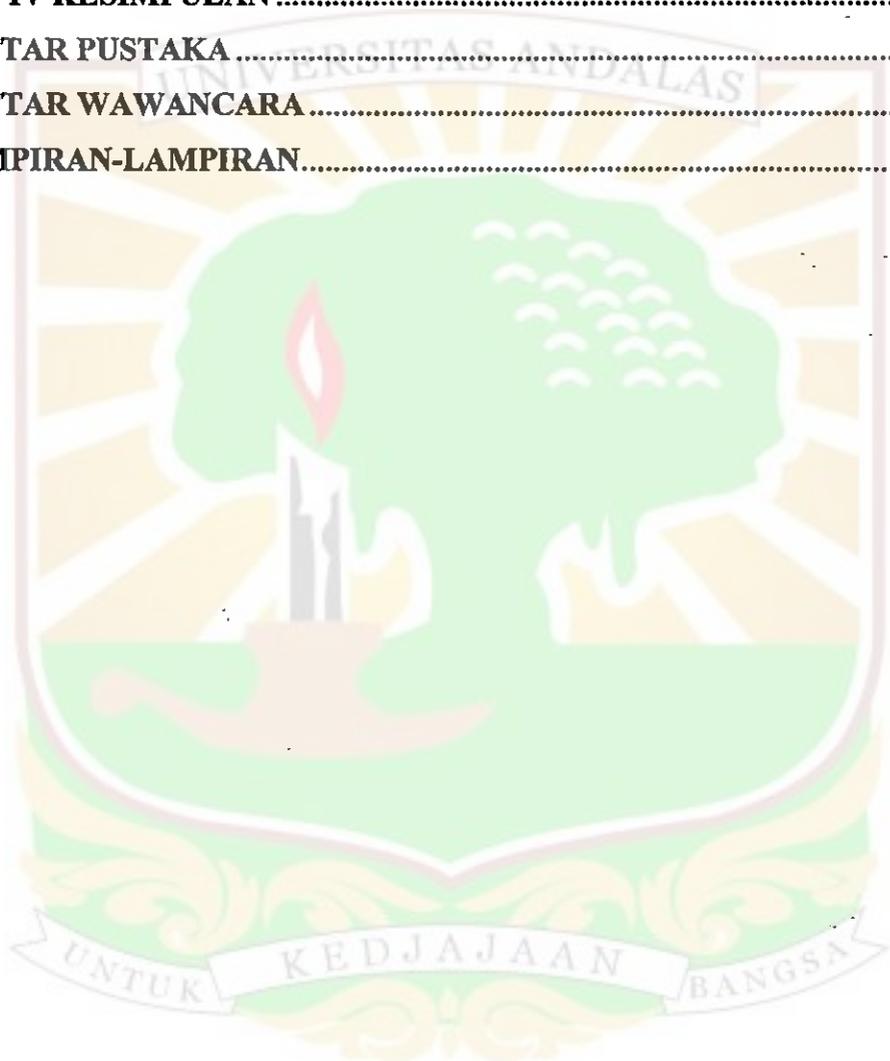
Hubungan Panghulu dengan dunia politik bukanlah sebuah hal yang baru terjadi di Sumatera Barat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, panghulu telah berkecimpung dalam dunia politik yakni ikut serta bekerja sama dengan Belanda. Panghulu juga menjadi aparatur pemerintahan Hindia Belanda di kelurahan dan nagari-nagari di Sumatera Barat dan Kabupaten Agam pada Khususnya. Pada Zaman Jepang, panghulu juga dipertahankan untuk menjaga tatanan pemerintahan tradisional di Sumatera Barat.

Pada masa Orde Baru, panghulu menjadi salah satu elit tradisional yang diajak bekerja sama oleh pemerintah. Hal ini dimanfaatkan oleh panghulu dengan ikut dalam Partai Politik terutama Golkar. Panghulu menjadi juru kampanye partai yang sangat efektif dan mudah diterima oleh masyarakat di nagari-nagari. Hasilnya banyak panghulu yang berhasil duduk di lembaga legislatif Kabupaten Agam.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Analisis	9
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika penulisan.....	20
BAB II PANGHULU DAN DINAMIKA POLITIK DI KABUPATEN AGAM	
A. Panghulu dalam Struktur Masyarakat	21
B. Panghulu dan Politik	30
C. Dinamika Politik di Sumatera Barat dan Kabupaten Agam Pada Masa Orde Lama	36
BAB III KETERLIBATAN PANGHULU DALAM POLITIK ORDE BARU DI KABUPATEN AGAM 1971-1998	
A. Panghulu dan LKAAM Pada Masa Orde Baru	43
B. Panghulu dan Partai Politik di Kabupaten Agam.....	55
1. Panghulu dalam Golkar.....	55
2. Panghulu dalam PPP	56
3. Panghulu dalam PDI.....	58
C. Panghulu dan Pemilu pada masa Orde Baru	59
D. Hubungan Panghulu dengan Pemerintah	65
E. Komposisi Panghulu dalam DPRD	67

BAB IV DAMPAK KETERLIBATAN PANGHULU DALAM	
POLITIK ORDE BARU DI KABUPATEN AGAM, 1971-1998	
A. Dampak dalam Bidang Pembangunan	77
B. Dampak dalam Bidang Politik	78
C. Dampak dalam Bidang Pemerintahan	79
D. Dampak dalam Bidang Budaya.....	80
BAB IV KESIMPULAN	81
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR WAWANCARA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90



DAFTAR TABEL

Judul Tabel

Tabel 1	: Hasil Pemilu 1955 di Daerah Pemilihan Sumatera Tengah (Sumbar, Riau, dan Jambi).....	37
Tabel 2	: Hasil Pemilu 1971 untuk Pemilihan Anggota DPR di Sumatera Barat.....	40
Tabel 3	: Jumlah Suara Pada Pemilu 1977 di daerah TK II Agam	63
Tabel 4	: Jumlah Suara Pada Pemilu 1982 di daerah TK II Agam	64
Tabel 5	: Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Agam Periode Tahun 1982-1987	67
Tabel 6	: Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Agam Periode Tahun 1987 – 1992	69
Tabel 7	: Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Agam Periode Tahun 1992 – 1997	71
Tabel 8	: Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Agam Periode Tahun 1997 – 1999	74



DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ABS-SBK	: Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
AMD	: ABRI Masuk Desa
BKPNM	: Kontak Perjuangan Ninik Mamak Pemangku Adat
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FKP	: Fraksi Karya Pembangunan
GOLKAR	: Golongan Karya
IDT	: Inpres Desa Tertinggal
KAN	: Kerapatan Adat Nagari
KODAM	: Komando Daerah Militer
KOPAN	: Komando Harapn
LKAAM	: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau
MTKAAM	: Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau
MUBES	: Musyawarah Besar
MUBESLUB	: Musyawarah Besar Luar Biasa
NEKOLIM	: Neo Kolonialisme
ORBA	: Orde Baru
ORLA	: Orde Lama
PAR	: Partai Adat Rakyat
PARMUSI	: Partai Muslimin Indonesia
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PERMI	: Persatuan Muslim Indonesia
PERTI	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
REPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
SAAM	: Syarikat Adat Alam Minangkabau
SUPERSEMAR	: Surat Perintah Sebelas Maret
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

DAFTAR ISTILAH

- Adat** : Aturan, kebiasaan yang tumbuh dan berbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya.
- Fungsionaris** : Penjabat (peagawai atau anggota Partai) yang menduduki suatu fungsi.
- Ideologi** : Cara berpikir seseorang atau golongan; paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program social politik.
- Kampanye** : Gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi); Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen.
- Kiesquotient** : Sebuah sistem yang di pakai untuk menentukan seseorang lolos atau tidak dalam pemilu denga cara membagi suara sah di satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi didaerah pemilihan tersebut
- Konservatif** : Kolot, bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tardisi yang berlaku.
- Legislator** : Orang-orang yang menjadi perwakilan rakyat di lembaga legislatif.
- Militeristik** : Suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya terletak pada kekuatan militernya.
- Minangkabau Raad** : Semacam lembaga perwakilan rakyat Minangkabau yang ada pada Zaman Belanda.
- Money Politics** : Politik Uang: politik yang sarat dengan permainan uang.
- Nagari** : Sekumpulan Kampung yang di pimpin (dikepalai) oleh seorang panghulu (Wali Nagari)
- Nagarihoofd** : Seseorang yang menjadi Kepala Nagari atau Wali Nagari.
- Otoriter** : Rezim politik yang ditandai dengan pemusatan kekuatan politik di tangan sekelompok kecil elit yang tidak memberikan pertanggung-jawaban kepada masyarakat secara institusional.
- Panghulu** : Seorang laki laki yang dituakan pada sebuah suku di Minangkabau. Ia di pilih sebagai pemimpin karena dianggap membidangi tentang seluk beluk urusan adat.
- Partisipasi politik** : Kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- Platform** : Rencana kerja; program. Pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip kebijaksanaan.

- Political Market* : Bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat)
- Pragmatis* : Bersifat praktis dan berguna untuk umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan ; mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis.
- Rezim* : Tata pemerintah Negara; pemerintahan yang berkuasa.
- Supermasi* : Kekuasaan tertinggi
- Track Record* : Perjalanan atau Riwayat seseorang.
- Ulama* : Orang yang ahli dalam Bidang Agama Islam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam adat Minangkabau dikenal tiga kelompok yang menjadi elit tradisional yang secara simbolik dituangkan dalam ungkapan *tungku tigo sajarangan*. Kelompok yang termasuk elit tradisional itu adalah Panghulu, alim ulama dan cadiak pandai. Ketiga kelompok ini saling bahu membahu mengelola kepemimpinan dan pemerintahan tradisional di Minangkabau. Pemerintahan tradisional ini berada pada tingkatan suku dan nagari.

Panghulu adalah seorang laki-laki yang dituakan pada sebuah suku di Minangkabau. Ia di pilih sebagai pemimpin karena dianggap menguasai tentang seluk beluk urusan adat¹. Panghulu dalam kehidupan sehari hari dipanggil dengan sebutan "Datuak". Fungsi seorang panghulu di Minangkabau adalah sebagai pemimpin suku dalam urusan adat dan menyelesaikan setiap sengketa atau perselisihan serta pemeliharaan harta pusako kaum. Peran vital inilah yang membuat panghulu mendapatkan tempat strategis dalam masyarakat Minangkabau. Panghulu juga mewakili saran saran dari anggota sukunya dalam pemerintah nagari, yang paling penting dalam hal ini adalah pembagian lahan-lahan yang belum digarap, tugas-tugas pengawasan hutan dan beberapa jenis pemilikan komunal lainnya.²

¹ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003). halaman.67

² Elizabeth E.Graves, *Asal Usul Elit Minangkabau Modern "Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2007). halaman.21

Dengan posisinya yang strategis itu, panghulu memiliki posisi tawar yang kuat. Hal ini misalnya terlihat sejak masa pra-kemerdekaan. Pada masa kolonial, Belanda berusaha memanfaatkan tatanan tradisional masyarakat Minangkabau ini, dengan cara mengubah karakter dan bentuk lembaga-lembaga tradisional sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Belanda. Kerapatan Nagari dijadikan sebagai lembaga pemerintahan terendah ; panghulu-panghulu di setiap nagari yang dulunya memimpin nagari secara bersama sama, kini diharuskan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi kepala nagari (*nagarihoofd*). Penggunaan tatanan tradisional masyarakat Minangkabau sebagai tatanan administrasi pemerintahan kolonial untuk mempermudah Belanda menjalankan kekuasaannya berlanjut sampai abad ke-20 dengan dikeluarkannya Ordonansi Nagari pada 1914.³

Dalam masa awal kemerdekaan dan dekade 1950-an, panghulu mencoba menghimpun kekuatan untuk ikut dalam percaturan politik. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya partai lokal yang berbasiskan adat yang dinamai Partai Adat Rakyat (PAR) dan Partai Majelis Tinggi Kerapat Adat Alam Minangkabau (MTKAAM). Partai ini diproyeksikan menjadi wadah berhimpunnya kaum adat di Minangkabau tahun 1950-an. Dengan mengusung isu isu adat, PAR mencoba menarik simpati masyarakat Sumatera Barat yang dikenal kuat memegang adat. Tapihasilnya, PAR dan Partai MTKAAM jauh dibawah harapan pengurusnya dan Partai Masyumi keluar sebagai pemenang di Sumatera Tengah waktu itu. Hal ini disebabkan oleh banyak tokoh tokoh utama Masyumi yang berasal dari Minangkabau, sebut saja M.Natsir dan Hamka.

³ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998.* (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2008) halaman.10

Pada masa permulaan Orde Baru bergulir, para panghulu yang dulunya mempunyai partai sendiri mulai banyak yang beralih ke Partai Golkar. Padahal terdapat perbedaan ideologis mencolok antara PAR dan Partai MTKAAM dengan Golkar. PAR dan Partai MTKAAM yang berhaluan primordialisme dan Golkar yang memakai ideologi kebangsaan. Banyaknya Panghulu bergabung ke Partai Golkar tentu memunculkan banyak pertanyaan. Salah satunya sebabnya karena adanya beberapa tokoh adat dalam lingkaran politik partai Golkar, salah satunya M.TH.Dt Panghulu Basa yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Agam periode 1982-1987.

Selain itu memang ada beberapa panghulu yang tidak masuk kedalam lingkaran Partai Golkar dan memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk di Kabupaten Agam sendiri, kita menemukan nama AR.Dt. Maruhun yang pernah menjadi anggota DPRD Kab.Agam dari Fraksi Persatuan Pembangunan pada periode 1982-1987. Sedangkan dari Partai Demokrasi Indonesia tidak ditemukan panghulu yang duduk di DPRD Kabupaten Agam.⁴

Dalam spektrum politik Orde Baru hanya ada dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu golongan, yaitu Golongan Karya⁵. Sekalipun secara teoritis Golkar melakukan peran sebagai parpol itu sendiri. Pada Masa ini hubungan antara kaum adat dengan partai Golongan Karya sangat intim, dimana terjadinya hubungan transaksional politik dari dua arah baik itu dari kelompok panghulu sendiri maupun dari Partai Golkar. Bergabungnya banyak panghulu ke dalam Golkar baik ditingkat provinsi

⁴ Arsip DPRD Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tahun 2012

⁵ A.Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). halaman 108

maupun kabupaten kemudian melahirkan legislator-legislator bergelar datuk di lembaga politik DPRD.

Keterlibatan panghulu dalam panggung politik ini tergambar dengan baik dalam lembaga DPRD di Kabupaten Agam. Jika kita melihat susunan anggota DPRD Kab.Agam dari tahun 1971-1998 selalu terdapat nama-nama yang bergelar Datuk yang notabene adalah seorang panghulu. Pada periode awal Orde Baru yakni periode 1971-1982, tidak terlalu banyak keterlibatan panghulu di DPRD Kab.Agam. Hal ini bisa dipahami karena penguatan internal Orde Baru pada lembaga politik.

Pada periode awal Orde Baru ini lembaga DPRD dipimpin oleh tiga orang ketua yang berasal dari luar panghulu yakni Abdul Munir (1969-1977), Mhd.Nur Syafei (1977-1980), Wagiran (1980-1982). Pada saat ini Rezim orde baru mencoba memperkuat kekuasaan dengan menempatkan militer dan orang yang berada diluar Kabupaten Agam untuk duduk pada lembaga politik. Barulah pada periode 1982-1987 dan 1987-1992 lembaga DPRD Kabupaten Agam dipimpin oleh seorang panghulu yang bernama M.TH.Dt. Panghulu Basa. Periode 1982-1987 lembaga DPRD Kabupaten Agam diisi oleh 10 orang panghulu dari total 39 orang anggota secara keseluruhan jika dilihat dari persentasenya 25% dari keseluruhan anggota DPRD Kab.Agam periode 1982-1987 adalah panghulu. Sedangkan pada periode selanjutnya yakni 1987-1992, DPRD Kab.Agam masih di pimpin oleh seorang panghulu yakni M.TH.Dt. Panghulu Basa. Pada periode ini, DPRD Kab.Agam diisi oleh 10 orang panghulu dari total 41 anggota secara keseluruhan⁶. Periode 1992-1997, DPRD Kab.Agam diisi oleh 9 orang

⁶ Arsip DPRD Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tahun 2012

panghulu dari total 42 orang anggota DPRD Kab.Agam. Periode terakhir Orde baru yakni 1997-1999, panghulu menduduki 10 kursi legislatif dari total 43 kursi DPRD Kab.Agam.⁷

Melihat dinamika yang menarik ini bisa dilihat bagaimana sosok panghulu mampu menempatkan mereka dalam posisi yang cukup strategis dalam lembaga DPRD di Kab.Agam dengan jumlah yang cukup besar. Kajian mengenai panghulu dalam dinamika politik Orde Baru di Kabupaten Agam sejauh yang diketahui belum ada yang meneliti. Sungguhpun demikian sudah ada beberapa literatur yang pernah mengkaji persoalan elit tradisional pada umumnya. Kiranya tinjauan terhadap beberapa karya berikut dapat membantu dalam penulisan ini.

Diantaranya tulisan Clifford Geertz yang merupakan ilmuwan pertama pasca kolonial yang tertarik meneliti orientasi kultural dari kaum priyayi dalam masyarakat Jawa. Bukunya yang berjudul *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* merupakan sebuah studi yang mendalam atas budaya priyayi sebagai sebuah kategori religius di dalam masyarakat Jawa. Dalam studi itu, Geertz tidak meletakkan priyayi dalam perspektif politis karena priyayi dalam studi Geertz adalah priyayi yang tidak berhubungan dengan sejarah dan struktur kekuasaan dalam masyarakat Jawa.⁸

Dalam nuansa yang berbeda, apresiasi terhadap priyayi menjadi perhatian Heather Sutherland. Dalam buku *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. Sutherland menyingkap beberapa informasi penting mengenai evolusi priyayi, terutama priyayi dalam pemerintahan. Buku ini menarasikan tentang para bupati di Jawa

⁷ Arsip DPRD Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tahun 2012

⁸ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya ,1981)

pada masa kolonial dengan pengawasan represi dari pejabat-pejabat Belanda yang berkedudukan di atas bupati pribumi.⁹

Tulisan tentang budaya priyayi muncul dalam buku Koentjaraningrat dengan judul *Kebudayaan Jawa*. Meskipun tidak secara spesifik berbicara mengenai priyayi, buku ini memaparkan sistem kekerabatan, pekerjaan, waktu senggang, dan kegiatan artistik priyayi di kota. Di sisi lain, Sartono Kartodirdjo menulis secara khusus tentang perkembangan peradaban priyayi.

Buku ini mengungkapkan dunia simbolik priyayi, gaya hidup, dan kehidupan spritual priyayi.¹⁰ Dunia bangsawan, menurut Sartono Kartodirdjo dilahirkan secara askriptif (keturunan), sedangkan kepriyayian lahir karena faktor pendidikan, prestasi, dan keahlian. Kedua, tulisan-tulisan tentang priyayi dan bangsawan mengabaikan konteks politis dari kebangsawanan dan kepriyayian. Dunia kebangsawanan dan kepriyayian bukanlah *immune* dari interaksi sosio-politis tertentu, sehingga diperlukan kajian tentang relasi antara ranah budaya kebangsawanan dengan struktur kekuasaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang Panghulu dalam dinamika politik Orde Baru di Kabupaten Agam, maka penelitian ini diberi judul **“Elit Tradisional di Panggung Politik: Keterlibatan Panghulu dalam Politik Orde Baru di Kabupaten Agam, 1971-1998”**.

⁹ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, “*Beberapa Dimensi Birokrasi dan Profesionalisme Indonesia dalam Perspektif Sejarah*” dalam *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: UGM Press, 1987)

B. Pembatasan dan Perumusan masalah

Penulisan ini berjudul “Elit Tradisional di Panggung Politik : “Keterlibatan panghulu Dalam Politik Orde Baru di Kabupaten Agam, 1971-1998”, untuk melihat keterlibatan panghulu dalam perpolitikan di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam serta motivasi apa yang diusung panghulu terjun ke dunia politik. Batasan temporal penelitian ini mencakup tahun 1971 sampai tahun 1998. Tahun 1971 dipilih sebagai batasan awal dari penelitian karena pada tahun ini merupakan Pemilu pertama yang diadakan oleh Rezim Orde baru pasca lengsernya kekuasaan Orde lama.

Pemilu tahun 1971 menjadi Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh Rezim Orde Baru pasca lengsernya Soekarno bersama Rezim Orde Lama. Pemilu ini melahirkan partai baru yang berhasil keluar sebagai pemenang yakni Golkar. Partai Golkar berhasil mengalahkan partai partai yang lebih berpengalaman seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Murba, Partai Nadhatul ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia dan partai partai lain. Peristiwa ini tentu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dicermati, Golkar yang notabene merupakan partai yang baru tetapi mampu memenangi pemilu.

Sedangkan tahun 1998 dipilih untuk melihat dinamika yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 27 tahun masa berkuasanya Rezim Orde Baru yang dihitung dari Pemilu 1971. Pada tahun ini juga menjadi berakhirnya Rezim Orde Baru yang ditandai dengan pidato pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang digantikan oleh B.J Habibie. Pada tahun 1998 juga merupakan titik bertukarnya sistem otoritarian menjadi demokrasi.

Penelitian ini mengkaji posisi dan peran kaum adat dalam dinamika politik yang terjadi dalam masa orde baru di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam sebagai kasus penelitian ini. Beberapa pertanyaan kunci yang diajukan, antara lain :

1. Siapakah panghulu dan bagaimana perannya dalam masyarakat tradisional Minangkabau?
2. Bagaimana proses yang melatarbelakangi hubungan antara panghulu dengan pemerintah Orde Baru berjalan di Kabupaten Agam ?
3. Apa saja motivasi panghulu terlibat di Partai Golkar di masa Orde Baru di Kabupaten Agam ?
4. Bagaimana perilaku dan peran politik panghulu dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Peran panghulu dalam Masyarakat di Kabupaten Agam
2. Proses yang melatarbelakangi hubungan antara panghulu dengan pemerintah Orde Baru.
3. Latar belakang keterlibatan panghulu terlibat dalam Partai Golkar dimasa Orde Baru di Kabupaten Agam.
4. Perilaku dan peran politik panghulu dalam dunia politik dan pemerintahan Kabupaten Agam.

D. Kerangka Analisis

Tulisan yang berjudul “Elit Tradisional di Panggung Politik : Keterlibatan panghulu dalam Politik Orde Baru di Kabupaten Agam 1971-1998” ini merupakan sebuah kajian sejarah Politik.

Penulisan sejarah membutuhkan kerangka teori agar dapat memahami fenomena sosial. Teori bukan saja diperlukan dalam menyimpulkan generalisasi-generalisasi yang diambil berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan, tetapi juga dalam memberi kerangka orientasi untuk mengklasifikasikan dan menganalisis fakta-fakta sejarah yang dikumpulkan dalam penelitian.¹¹

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Alfian, fungsi teori adalah membantu menemukan masalah-masalah yang hendak diteliti, yaitu mengidentifikasi problema-problema dan menyajikan kategori-kategori dalam mengorganisasi data.¹² Untuk mencapai tujuan itu digunakan alat-alat analisis, yakni konsep dan teori yang sesuai sehingga menghasilkan sebuah karya sejarah deskriptif analitis, namun tidak mengabaikan unsur narasi karena merupakan salah satu sifat utama pada penulisan sejarah adalah memaparkan suatu peristiwa secara urutan waktu disuatu tempat dalam kurun waktu tertentu.

Konsep pertama dalam penelitian ini adalah konsep elit. Teori elit memandang bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua katagori yang luas dan mencakup beberapa hal yakni; *pertama*, sekelompok kecil manusia dan berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan *kedua*,

¹¹Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah*, dalam Koentjaraningrat (ed). PT. Gramedia : Jakarta. Halaman 8-23; lihat Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Gramedia, 1977) halaman 1-4.

¹²Teuku Ibrahim Alfian, *Dimensi Teori Dalam Wacana Ilmu Pengetahuan*. Makalah disampaikan pada acara Studium Generale Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa LIA Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2002. halaman. 1

sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan maupun sedang berkuasa.¹³

Elit bangsawan yang menempati lapisan paling atas dalam struktur masyarakat telah memegang peran penting dalam sejarah panjang negara ini. Elit ini, baik sebelum kemerdekaan maupun setelahnya, nyatanya memiliki dinamika dalam merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Respon yang diberikan itu tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ada ciri khas yang dilakukan oleh elit bangsawan dalam merespon perubahan yang dihadapinya.

Dalam kelompok elit itu, karena perkembangan demokrasi, akan terjadi sirkulasi elit, yaitu rotasi bergesernya atau bergantinya individu yang memegang jabatan politik strategis melalui mekanisme rekrutmen politik. Alfian mengidentifikasi sirkulasi elit dalam tiga tipe. *Pertama*, sirkulasi elit yang berlangsung di antara mereka yang tergabung dalam *The governing elite*. *Kedua*, sirkulasi elit yang berlangsung antara mereka yang tergabung dalam *the governingelite* dengan massa, dan *ketiga*, sirkulasi elit bentuk dari tipe kedua dapat berupa: 1) individu-individu dari strata bawahan yang berhasil masuk ke dalam jaringan elit; 2) individu-individu dari strata bawah yang membentuk kelompok elit baru dan berjuang melawan elit yang sudah ada untuk memperoleh kekuasaan.¹⁴

¹³S.P. Varma, *Teori Politik Modern*. Rajawali Pers : Jakarta. halaman. 199. Dan lihat Maurice Duverger. 1982. *Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982) halaman. 179.

¹⁴Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik; Perbincangan Kepimpinan dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) halaman. 61.

Dalam masyarakat tradisional konsep elit atau bangsawan merujuk pada mereka yang memegang kekuasaan tertinggi. Mereka memegang kekuasaan karena faktor keturunan (darah) yang didapatkan lewat mitos yang diciptakan. Walaupun demikian, menurut Marc Bloch, kelompok bangsawan merupakan suatu kelas sosial yang nyata memegang kekuasaan.

Menurutnya, ada dua ciri yang dimiliki kelas bangsawan. *Pertama*, harus memiliki status legalnya sendiri. Status itu penting untuk menegaskan dan mengukuhkan superioritas yang dituntutnya. *Kedua*, status itu haruslah turun temurun, meskipun terbuka untuk keluarga baru untuk diterima ke dalam kelompok itu, namun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang secara formal berlaku.¹⁵

Konsep kedua, adalah teori Modalitas, salah satu pemikiran yang dikembangkan oleh filsuf kenamaan asal Prancis yang bernama Pierre Bourdieu. Menurut kepemilikan modalitas merupakan sebuah kekuatan utama bagi setiap individu untuk merebut dan mendapatkan kekuasaan dalam sebuah *space* yang disebut sebagai arena kekuasaan.¹⁶

Terkait dengan pemikirannya tentang modalitas, Bourdieu kemudian membagi modalitas menjadi lima bagian yaitu; *economic capital*, *political capital*, *cultural capital*, *symbolic capital* dan *sosial capital* yang menjadi bagian dalam melegitimasi kepemilikan kekuasaan (*symbolic capital-legitimate authority*). Pierre Bourdieu sebagai penggagas pemikiran tentang modalitas yang

¹⁵ Marc Bloch, *Kaum bangsawan Selaku kelas Menurut Kenyataan*, dalam Sartono (ed.) *Elite dalam perspektif Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1981) halaman. 23.

¹⁶ Pierre Bourdieu, *Language and symbolic power* (Cambridge-UK: Polity Press, 1991)

menjelaskan bahwa kepemilikan modal sosial (*social capital*) memainkan peran yang sangat penting untuk merebut kekuasaan dalam sebuah arena kekuasaan.¹⁷

Konsep modal menurut Pierre Bourdieu, merupakan hubungan sosial, artinya suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam arena perjuangan dimana ia memproduksi dan mereproduksi setiap kepemilikan yang terkait dengan kelas (kekayaan ekonomi atau budaya).

Oleh karena itu, modal budaya (*social Culture*) sebagai salah satu bagian dari berbagai modal yang terdistribusikan dalam sebuah kehidupan yang secara nyata yang mendapat legitimasi dari masyarakat dan lembaga dalam memperoleh kekuasaan yang diinginkan.

Dalam sebuah kontestasi politik, modal politik merupakan salah satu modal dasar yang harus dimiliki oleh para kontestan untuk maju dalam sebuah pemilihan umum. Untuk maju menjadi calon legislatif dibutuhkan modal politik (*political capital*), karena dengan modal politik (*political capital*) sang calon dapat membangun relasi politik di pemilu dalam memperkuat basisnya.

Relasi ini meliputi hubungan jaringan dengan seluruh komponen dari lembaga tradisional hingga lembaga moderen serta elit-elit yang ada di daerah tersebut. Sejalan dengan itu, modal politik juga berfungsi sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan.

Lebih lanjut Kacung Marijan merinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik

¹⁷ Ibid

atau sebuah lembaga. Pasar politik *pertama*, adalah pemilu, instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi. Pasar politik *kedua* adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik *ketiga* adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik *empat*, adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik.¹⁸

Ketiga, adalah konsep perilaku politik. Politik sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sampai dalam melaksanakan tujuan tersebut.

Roger F Soltau mendefinisikan ilmu politik sebagai kajian tentang negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya atau dengan negara-negara lain.¹⁹

Di sisi lain, Deliar Noer mengemukakan bahwa ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.²⁰ Dengan demikian, sebagai disiplin empiris, politik merupakan ilmu tentang kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan melaksanakan kekuasaan dan mengatur pembagian nilai secara autoritatif untuk dan atas nama masyarakat.

¹⁸Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006) halaman. 82.

¹⁹ Roger F Soltau, *The Study Of Politic*. Alih bahasa oleh Daniel Dhakide. *Sosiologi politik*. (Jakarta: Rajawali, 1991) halaman. 4.

²⁰ Deliar Noer, *Tradisi Kekerasan Politik di Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995) halaman. 56.

Sejalan dengan itu, Claessen menjelaskan bahwa politik merupakan salah satu bentuk hubungan sosial yang dilandasi oleh aturan-aturan dan tindakan-tindakan kekerasan untuk menguasai sumber-sumber daya dan mempengaruhi kepentingan umum.²¹

Sebagaimana dikemukakan oleh Roger F Soltau dan Deliar Noer di atas, politik merupakan proses-proses atau kegiatan-kegiatan dalam perilaku politik. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan perilaku, yang perlu dipelajari dari suatu lembaga politik bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga.

Untuk mempertajam analisis kajian ini, digunakan pandangan yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yakni bahwa sejarah politik tingkat-lokal adalah peristiwa-peristiwa nasional yang menjadi bagian dari peristiwa lokal, bukan peristiwa lokal yang tetap lokal, akan tetapi lokal meningkat jadi nasional, atau nasional yang meningkat menjadi internasional.²² Definisi tersebut memberi pemahaman tentang perbedaan politik tingkat lokal dengan politik lokal. Jika politik tingkat lokal adalah kepanjangan dari peristiwa-peristiwa nasional, maka sebaliknya politik lokal adalah peristiwa-peristiwa lokal berhenti di tempat itu tanpa ada kaitannya dengan peristiwa nasional.²³ Jadi yang membedakan kedua konsep tersebut adalah ruang lingkup permasalahannya.

Berbeda dengan Kuntowijoyo yang membedakan politik tingkat lokal dengan politik lokal, Sartono Kartodirdjo tampaknya tidak melihat perbedaan tersebut, bahkan cenderung menggunakan kedua konsep itu secara bersamaan

²¹ Claessen, *Antropologi Politik: Suatu Orientasi*. Alih bahasa R.G. Soekadijo (Jakarta: Erlangga, 1987) halaman. 52-53.

²² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003) Halaman) 186.

²³ *Ibid.* Halaman 176.

seolah-olah keduanya tidak memiliki perbedaan substansial. Kendati demikian, kedua sejarawan ini sepakat pada satu pemahaman umum bahwa sejarah politik tidak lagi semata-mata menulis mengenai politik, tetapi tentang kekuasaan secara umum. Keduanya memahami bahwa proses politik sangat ditentukan oleh sikap dan kelakuan politik yang pada hakekatnya bersifat multidimensional dan mencakup faktor ekonomi, sosial budaya, religi dan sebagainya.²⁴

Sartono Kartodirdjo memahami peristiwa-peristiwa politik sebagai sebuah proses kompleks yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan pengikut, otoritas dan ideologi, ideologi dan mobilisasi, solidaritas dan loyalitas. Kesemuanya akan mampu mengungkap pola distribusi pengaruh dan kekuasaan (*polity*) dalam kaitannya dengan pola distribusi komoditi (*economy*) serta dengan *society* sendiri (pola distribusi hubungan sosial). Kesemuanya itu didasarkan atas budaya (pola distribusi nilai-nilai).²⁵

Konsep selanjutnya, adalah teori partisipasi politik, menurut salah seorang Ilmuwan politik yang bernama Samuel Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.²⁶ Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah

²⁴Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1992) halaman. 174.

²⁵*Ibid.* Halaman 47.

²⁶ A. Rahman, *Op.Cit.* halaman 285.

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya.

Konsep selanjutnya, adalah teori otoritarianisme atau sistem otoriter. Sistem otoriter adalah rezim politik yang ditandai dengan pemusatan kekuatan politik di tangan sekelompok kecil elit yang tidak memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara institusional. Jadi mereka tidak memiliki hal-hal yang menandai orde-orde demokratik liberal khususnya kebebasan sipil yang luas, rule of law, kompetisi antar-partai dan pemerintahan perwakilan. Ada berbagai bentuk pemerintahan otoriter. Pemerintahan bisa dijalankan oleh militer atau politisi sipil, dan kekuatan politik bisa dijalankan secara langsung oleh individu atau melalui sebuah partai politik. Barangkali perbedaan yang paling penting pada rezim otoriter adalah pada dimensi-dimensi despotisme dan penetrasi. Despotisme adalah seberapa jauh kekuatan politik itu dimainkan dan dijalankan tanpa batas, dan penetrasi adalah seberapa jauh negara otoriter itu mengatur kehidupan sehari-hari warganya.²⁷

Konsep lain yang dipakai dalam tulisan ini adalah Militeristik. Militeristik adalah suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya terletak pada kekuatan militernya dan mengklaim bahwa perkembangan dan pemeliharaan militernya untuk menjamin kemampuan itu adalah tujuan terpenting dari masyarakat. Sistem ini memberikan kedudukan yang lebih utama kepada pertimbangan-pertimbangan militer dalam kebijakannya daripada kekuatan – kekuatan politik lainnya.²⁸

²⁷ A. Rahman, *Op.Cit.* halaman 102

²⁸ [Id.wikipedia.org/wiki/militeristik](http://id.wikipedia.org/wiki/militeristik)

Birokrasi juga digunakan sebagai konsep dalam penelitian ini. Birokrasi dapat dirumuskan sebagai suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi.²⁹

Konsep terakhir yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep eksekutif dan legislative. Eksekutif adalah sebuah badan yang memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang luas serta perangkat institusi pendukung dalam berbagai aspek dan keahlian yang dapat memberi dukungan (*support*) bagi percepatan pelayanan masyarakat (*public service*) dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Eksekutif ini dikepalai oleh Raja, Presiden serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh para Kabinet (Menteri).³⁰

Legislatif adalah sebuah lembaga yang membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat dimanapun dia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Indonesia yang tergolong dalam lembaga legislative ialah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten.

E. Metode Penelitian

Metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh hasil rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode sejarah dapat dibagi dalam empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.³¹

²⁹ A. Rahman, *Op.Cit.* halaman 170.

³⁰ *Ibid.* halaman 189

³¹ Louis Gottshalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1975) halaman. 50.

Lebih jauh Louis menjelaskan bahwa metode sejarah ialah proses menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau.

Heuristik merupakan sebuah kegiatan mencari sumber sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.³² Sumber sumber dari penelitian ini diperoleh dari Studi kepustakaan. Studi kepustakaan bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan data data yang terkait dengan tema penelitian. Pustaka Jurusan Ilmu Sejarah Unand, Pustaka Fakultas Ilmu Budaya Unand, Pustaka Jurusan Ilmu Politik Unand, Pustaka Universitas Indonesia, Pustaka Kabupaten Agam dan Pustaka Daerah Sumbar menjadi tempat menulis mencari buku yang terkait dengan penelitian penulis. Selain itu penulis juga melakukan pencarian data pada arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Pencarian arsip dan dokumen ini penulis lakukan di Arsip daerah Kabupaten Agam, DPRD Kabupaten Agam, Pustaka daerah Sumbar dan Arsip-arsip pribadi yang dimiliki oleh narasumber.

Selain dari study pustaka, studi lain juga penulis tempuh untuk menyempurnakan penelitian ini yakni wawancara mendalam dengan para informan. Informan informan yang diwawancarai berasal dari anggota DPRD Kabupaten Agam dengan latar belakang panghulu yang menjabat pada masa Orde Baru yakni sejak tahun 1971-1998. Selain itu penulis juga mewawancarai para pengurus partai politik yang ikut andil dalam proses politik Orde baru. Tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat awam yang hidup pada massa Orde baru juga masuk dalam kategori narasumber yang penulis wawancarai. Itulah kriteria informan yang penulis wawancarai. Narasumber-narasumber ini tersebar dalam

³²Helius Sjamsuddin, *Metode Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007) :. halaman. 85.

kecamatan-kecamatan di Kabupaten Agam, sebut saja Tanjung Raya, Matur, Palembang, Baso, Canduang, Palupuah dan lain lain. Selain itu penulis juga ke Jakarta untuk mewawancarai salah satu narasumber yang penulis anggap penting dalam perjalanan politik Orde Baru di Sumatera Barat. Rumusan pertanyaan dalam wawancara menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menghasilkan data yang objektif dan mendalam dari setiap informan yang diwawancarai.

Tahapan kedua adalah melakukan kritik sumber, baik dari sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik Sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstren. Kritik ekstren merupakan proses untuk menyelidiki keaslian sumber yang didapatkan, sedang kritik intern menyelidiki kredibilitas sumber atau informasi agar bias dipercayai.³³ Kritik dari sumber ini bertujuan untuk mendapatkan kevalidan dari setiap data yang ditemukan dilapangan. Penulis beberapa kalimelakukan kritik sumber, yang pertama ialah ketika penulis mendapatkan data tentang nama-nama anggota DPRD Kabupaten Agam dari beberapa periode. Didalamnya terdapat ketidak cocokan antara nama dan fraksi anggota DPRD Kabupaten Agam pada periode 1982-1987, 1987-1992. Ketidak cocokan nama anggota DPRD Kabupaten Agam ini penulis temukan setelah sebelumnya melakukan wawancara dengan Syukirman Dt. Tumbijo yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Agam pada periode itu. Kritik penulis menjadi masukan pada bagian kesekretariatan DPRD Kabupaten Agam dan segera dilakukan perbaikan.

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi data, yaitu penafsiran dan pengelompokan fakta dalam berbagai hubungan. Kemudian dijelaskan dengan

³³*Ibid*.halaman 131

mencari hubungan sebab akibat untuk mendapatkan suatu benang merah antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainya dari kasus yang diteliti.

Tahapan akhir dari metode ini ialah historiografi, dimana penulis mulai melakukan penulisan sejarah dengan menggunakan kaidah penulisan ilmu sejarah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Menggambarkan Kaum Adat dan Politik di Kabupaten Agam.

Bab III Membahas tentang keterlibatan panghulu di panggung politik Orde Baru di Kabupaten Agam.

Bab IV Membahas dampak dari keterlibatan panghulu di panggung politik orde baru di Kabupaten Agam

Bab V Merupakan kesimpulan, yaitu jawaban dari pertanyaan penelitian yang digariskan dalam rumusan masalah. Sekaligus penutup hasil penelitian.

BAB II

PANGHULU DAN DINAMIKA POLITIK DI KABUPATEN AGAM

A. Panghulu dalam Struktur Masyarakat

Kabupaten Agam dulunya merupakan wilayah dari *Luhak nan Tigo*. Luhak nan Tigo adalah tiga daerah utama di Sumatra Barat, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Limo Puluah Koto.³⁴ Ketiga luhak merupakan pusat kebudayaan Minangkabau yang dikenal dengan nama *darek*. Sejak dulu ketiga daerah ini memiliki masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat dan dianggap menjadi representatif kebudayaan Minangkabau.

Kabupaten Agam mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Diawali dari Kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat Minangkabau telah memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan Belanda, beberapa peristiwa tersebut ialah Perang Manggopoh dan Perang Kamang.

Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, dimana Kabupaten Agam tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk daerah Limo Koto Kampar (Bangkinang) yang sekarang termasuk Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) sekarang termasuk Propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan (Koto Nopan) yang sekarang secara administrasi berada di Propinsi Sumatera Utara. Pemerintahan adat mencakup

³⁴ Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Prespektif Sejarah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). halaman 21

Luhak dan Rantau, dimana Pemerintahan Wilayah Luhak terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah dan Luhak Agam.³⁵

Komisariat Pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi mengeluarkan peraturan tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibukotanya Bukittinggi yang meliputi kewedanan Agam Tuo, Padang Panjang, Maninjau, Lubuk Sikaping dan Kewedanaan Talu.³⁶

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanan masing-masing Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu.³⁷

Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No.171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi Kotamadya Bukittinggi.

Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II

³⁵ Bappeda Kabupaten Agam, *Agam dalam angka 2012* (Lubuk Basung: Halaman Bappeda Kabupaten Agam, 2012) halaman x.

³⁶ *Ibid.* Halaman x

³⁷ *Ibid.* halaman xi

dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam.³⁸

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara *de facto*, ibukota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP Nomor 8 Tahun 1998).

Masyarakat Minangkabau hidup dalam golongan yang beraneka ragam. Golongan yang terpenting ialah kekerabatan sedarah dari turunan ibu. Golongan itu bertingkat tingkat. Dari tingkat yang paling kecil sampai ke tingkat yang paling besar merupakan suatu kesatuan yang utuh.³⁹

Disamping golongan keturunan sedarah, mereka hidup berkelompok dalam berbagai jenis perkampungan, seperti = *teratak, dusun, korong koto dan nagari*. Dalam perkampungan itu, hiduplah golongan golongan itu secara berbaur erat dalam bentuk integrasi dan asimilasi antargolongan. Disamping itu mereka pun mempunyai perserikatan dalam jenis pekerjaan, keahlian, kegemaran dan sebagainya tanpa terikat pada golongan keturunan darah, kelompok permukiman dan status sosial.

Masyarakat Minangkabau terbagi dari berbagai macam suku yang menjadi ikatan kekerabatan. Suku adalah kelompok matrilineal, yang masing-masing mempunyai nama tersendiri.⁴⁰ Suku yang pertama berjumlah empat, yakni Bodi, Caniago, Koto, dan piliang, yang terbagi dalam dua keselarasan, yaitu keselarasan Bodi Caniago dan Kelasan Koto Piliang. Lambat laun suku suku itu berkembang menjadi lebih dari empat puluh buah. Pada mulanya suku-suku itu

³⁸ *Ibid.* Halaman xii

³⁹ AA Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* (Jakarta: PT. Graviti Pers, 1984)

⁴⁰ Tsuyoshi Kato. *Op.Cit.* halaman 32

merupakan penganut laras yang ada. Selain *Laras nan Dua*, muncul pula laras ketiga yang bernama *Laras nan Panjang* di bawah pimpinan Datuk Sekelap Dunia yang membentuk lima suku lainnya, yaitu *Kutianyir, Patapang, Banuhampu, Salo dan Jambak*. Sedangkan orang asing yang jadi kaula Raja Pagaruyung mendirikan suku Melayu, Mandahiliang, Kampai, Singkuang, dan Bendang. Kemudian aliran kelarasan tidak lagi menjadi anutan suku, melainkan menjadi anutan nagari. Contohnya ada suku Caniago mendiami nagari yang menganut aliran Koto Piliang, seperti terjadi di Luhak Kubung Tiga Belas.⁴¹

Setiap suku dalam nagari di Minangkabau dipimpin oleh panghulu. Panghulu adalah *andiko* dari kaumnya atau raja dari kemenakannya, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan menjadi pemimpin, menjadi hakim dan pendamai di dalam kaumnya. Ia juga menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya, ia bertindak sebagai penggembala yang bersifat mobil, yang tiada bemarkas atau tempat kedudukan. Dalam menghadap orang luar, ia hanya dapat dihubungi di rumah pusaka kaumnya, yakni di rumah gadang. Namun, di rumah tempat tinggal bersama istrinya, kedudukannya sama dengan orang sumando lainnya.⁴²

Sebagai pemimpin kaumnya, panghulu dikatakan mempunyai hutang, yakni bertanggung jawab dan kewajiban yang harus diingatnya sepanjang waktu. Sebuah pepatah mengatakan bahwa panghulu ibarat: "*Kayu gadang ditengah padang, ureknyo tampek baselo, dahanyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda* (kayu besar ditengah padang, uratnya

⁴¹AA Navis. *Op.Cit.* Halaman 129

⁴²*Ibid.* Halaman 138

tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar). Maksudnya, sebagai seorang pemimpin, panghulu harus memelihara keselamatan dan kesejahteraan warganya sesuai dengan hukum serta kelaziman.

Jabatan panghulu merupakan warisan turun temurun menurut Sistem Matrilineal. Dari *niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan*. Kemenakan yang berhak menerima warisan itu ialah kemenakan yang mempunyai pertalian darah. Namun, ada dua pendapat dalam hal pewarisan itu sesuai dengan aliran kelarasan yang dianutnya : Pertama ialah *warih dijawek*. Maksudnya, yang berhak mewarisi jabatan panghulu adalah kemenakan langsung, anak dari saudara perempuan . Sistem ini sesuai dianut oleh alirasn kelarasan Koto Piliang. Kedua ialah *Gadang Bagilia*. Maksudnya, yang berhak mewarisi jabatan panghulu ialah semua laki laki warga kaum dengan cara bergiliran antara mereka yang seasal-usul. Sistem ini dianut aliran kelarasan Bodi Caniago.

Semua calon diseleksi dengan cara *ditatiang ditampih bareh, dipilih atah ciek ciek* (Ditanting ditampas beras, dipilih atah satu satu). Artinya seleksi itu dilakukan seperti orang menampi beras untuk mencari gabah sebelum ditanak. Setelah diperoleh calon yang serius, lalu *dituah dicilakoi* (dituah dicelakai). Artinya, keadaan calon itu dikaji kebaikan dan keburukannya oleh warga kaum, sehingga andai kata calon itu terpilih, tidak akan terjadi *rumah sudah tokok paek babunyi* (rumah sudah ketokan pahat berbunyi). Maksudnya, bila calon itu telah diangkat jadi panghulu, tidak ada omelan dikemudian hari. Meskipun prosedur pemilihan dilakukan secara musyawarah dikalangan kaum sendiri, sesungguhnya usaha mencari calon yang tepat telah dimulai oleh tokoh tokoh terkemuka dalam

kaum dengan cara mengamati siapa yang pantas untuk diangkat menjadi panghulu.⁴³

Usaha mencari calon panghulu tidak selalu berjalan lancar, baik dalam pencalonan menurut *warih dijawek* maupun dalam pencalonan menurut sistem *gadang bagilia*. Karena beberapa orang calon yang berambisi atau yang paling berhak menurut sistem *warih dijawek* atau *gadang bagilia* mempunyai banyak kelemahan tidak mendapat dukungan sepenuhnya, maka acara penggantian panghulu *dilatak dulu* (diletak dulu), yang artinya ditangguhkan dulu sampai datang saat yang tepat. Akan tetapi kalau tidak didapat kesepakatan antara kaum yang berhak, ada banyak alternatif pada dasarnya menghasilkan perpecahan atau pembelahan kaum dalam bentuk *mangguntiang siba baju atau gadang manyimpang* (menggunting sebar baju atau besar menyimpang).

Apabila acara pencalonan berjalan lancar, sehingga telah diperoleh seorang calon pilihan, oleh kaum yang bersangkutan disampaikan hasilnya kepada kerapatan adat nagari yang dihadiri oleh semua panghulu. Kepada kerapatan diminta persetujuan nagari, agar panghulu kaum mereka diterima sebagai panghulu yang sah dan dijadikan salah seorang dari yang banyak. Setelah semua anggota kerapatan menyatakan persetujuan, lalu oleh kaum disampaikanlah hari perjamuan untuk manegakkannya. Seiring dengan itu, diundang seluruh *urang ampek jiniah* untuk menghadiri perjamuan itu. Lalu kepada kerapatan dibayarkan *bea lilin ambalau dan bea manurunkan jamuan* (lilin ambalau dan menurunkan jemur), yaitu bea persetujuan dan perjamuan.⁴⁴

⁴³*Ibid.* Halaman 145

⁴⁴*Ibid.* Halaman 146

Sesuai dengan posisi panghulu yang strategis di dalam masyarakat, maka penobatan panghulu bukan sebuah acara yang sederhana. Pengangkatan seorang panghulu selalu dilaksanakan dengan upacara yang besar, sering kali untuk upacara seperti ini dipotong beberapa ekor kerbau dan para pemuka nagari diundang untuk menyaksikan dan menyetujui penobatan itu.⁴⁵ Dalam acara penobatan managakkan panghulu dilakukan di *medan nan bapaneh* (lapangan yang berpanas). Bendera *marawa* dikibarkan, gong dipukul sepanjang hari, kerbau disembelih, perjamuan berlangsung selama tiga hari dengan acara sebagai berikut. Hari pertama, *hari batagak gadang* (mendirikan panghulu), yakni upacara peresmian. Upacara berlangsung *dirumah gadang* dan dihadiri *urang ampek jinih*.⁴⁶

Salah seorang panghulu menyampaikan pidato penobatan, yang isinya antara lain meminta hadirin agar panghulu baru dibawa sehilir semudik atau bekerja sama oleh yang hadir. Kemudian oleh panghulu yang tertua dari yang setungku diletakan destar saluak dikepalanya dan disisipi sebilah keris di pinggangnya. Akhirnya diucapkanlah sumpah sakti agar panghulu tidak menyimpang dari tugasnya. Isi sumpah : *Akan dimakan biso kawi, di ateh indak bapucuk, di bawah indak baurek, di tengah tengah digiriak kumbang* (akan dimakan bisa kawi, di atas tidak berpucuk, di bawah tidak berurat, ditengah ditembus kumbang. Selesai sumpah dibacakan doa, lalu hadirin diperlihatkan makan dengan pidato persembahan. Hari kedua, hari perjamuan yang dimeriahkan dengan kesenian serta jamuan makan minum kepada seluruh warga nagari yang datang. Hari ketiga, hari perarakkan dengan diantar tari glombang dan dimainkan

⁴⁵ Tsuyoshi Kato. *Op.Cit.* halaman 32

⁴⁶ AA Navis. *Op.Cit.* Halaman 147

alat musik, panghulu baru diarak kerumah bako. Itulah posisi terakhir dari penobatan panghulu.⁴⁷

Sebagai orang besar, panghulu dilengkapi dengan seperangkat staf yang akan membantunya dalam bertugas. Namun tidak berarti setiap panghulu yang memiliki perangkat yang lengkap. Perangkat panghulu itu ialah sebagai berikut ; Pertama adalah *panungkek* (penongkat), yaitu pembantu utama panghulu. Ia dapat mewakili panghulu bila panghulu berhalangan. Namun, dalam kerapatan nagari, ia hanya boleh mewakili selaku pendengar. Kedua ialah *malin* (malim), ialah guru dan orang alim dalam hal agama, yang mengatur serta mengurus masalah keagamaan dan ibadah. Ketiga ialah *manti* (mantri) yaitu pembantu panghulu dibidang tatalaksana pemerintah nagari. Keempat ialah *dubalang*, yaitu petugas penjaga keamanan nagari. Panghulu dengan ketiga perangkatnya disebut *urang ampek jinih*. Pembantu panghulu ini tidak baku dipakai untuk keseluruhan nagari di Minangkabau.⁴⁸

Panghulu yang merupakan pemimpin dalam kaum juga mempunyai seperangkat pakaian kebesaran. Pakaian panghulu mengandung arti simbolik , baik warna, model, maupun cara memakainya. Pada dasarnya pakaian panghulu serba hitam, mulai dari destar, baju sampai celana. Warna hitam melambangkan ketahanan, keuletan, dan ketidaktercelaan. Sedangkan pengertian model pakiannya sebagai berikut ; Pertama ialah Deta saluak (destar saluk). Lipatan kerut-merut destar saluk mencerminkan akal yang berlipat lipat, tidak mudah ditafsirkan dan mampu menyimpan rahasia. Destar dipasang lurus di kepala

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid. Halaman 143

melambangkan pertimbangan yang adil. Kedudukannya yang longgar melambangkan pikiran yang lapang, tetapi tidak tergoyahkan.

Kedua ialah *baju tanpa saku, berlengan lapang dengan panjang sedikit di bawah siku*. Baju tidak bersaku melambangkan panghulu tidak mengantungi apa pun bagi dirinya sendiri. Lengan longgar dan tergantung sedikit dibawah siku melambangkan sifatnya yang ringan tangan dalam membantu kesukaran orang lain. Ketiga ialah *celana longgar serta lapang*, melambangkan kemampuan membuat langkah kebijaksanaan yang tetap dengan gerakan ringan, santai, tidak menyulitkan. Keempat ialah *sisampiang*, kain yang diikatkan dari pinggang kebagian atas lutut melambangkan kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjaga diri dari kesalahan atau kekhilafan. Kelima ialah *cawek* (cawat), yaitu ikat pinggang yang melambangkan kekukuhan ikatan atau pegangan dalam menyatukan warga kaum baik yang di dalam maupun di luar kampung. Keenam ialah *salempang* yang digantungkan di bahu melambangkan kemampuan memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ketujuh ialah *karih* (keris) yang disisipkan di pinggang dengan hulunya yang tidak terpatri, dan diarahkan ke sebelah kiri, melambangkan bahwa panghulu mempunyai senjata, tetapi bukan untuk membunuh. Kedelapan ialah *tungkek* (tongkat) dari kayu yang lurus. Melambangkan bahwa panghulu dapat menopang dirinya sendiri tanpa membebani kaumnya.

Sebagai seorang pemimpin kaum seorang panghulu juga memiliki pantangan yang tidak boleh dilakukan. Bahkan timbangan kesalahan panghulu akan menjadi lebih berat jika dibandingkan dengan kesalahan yang sama kalau dilakukan orang biasa. Apa saja yang tidak boleh dilakukan orang umum juga

tidak boleh dilakukan oleh panghulu. Selain itu dalam sebuah pepatah minang juga dijelaskan pantangan seorang panghulu yakni : *Mamerahkan muko, mahariak mahantam tanah, manyinsiangkan langan baju, balari-lari, mamanjek-manjek, manjujuang jo kapalo* (memerahkan muka, menghardik menghantam tanah, menyingsingkan lengan baju, berlari lari-lari, memanjat-manjat, menjujung dengan kepala).⁴⁹

Dari sekian banyak penjelasan terkait panghulu, jelas tergambar bagi kita bahwa seorang panghulu di Minangkabau bukanlah orang sembarangan yang bisa di pandang sebelah mata. Posisi panghulu yang menjadi pemimpin tradisional di Minangkabau mempunyai peran besar terhadap kaum, baik itu terkait harta pusaka, menyelesaikan perselisihan, perwakilan di kerapatan adat nagari dan banyak tugas penting lagi. Sehingga hal ini bisa menjadikan seorang panghulu dengan mudah mengarahkan anak kemenakan untuk melakukan sesuatu.

B. Panghulu dan Politik

Dari masa ke masa, panghulu yang menjadi salah satu simbol elit tradisional Minangkabau mempunyai peran yang penting dalam menyukseskan politik kebijakan pemerintah yang berkuasa. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, panghulu menjadi sosok yang dijadikan sebagai ujung tombak pemerintahan Hindia Belanda dalam menyukseskan kebijakan pemerintah kolonial pada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tatanan tradisional Minangkabau yang sudah sejak dulunya menjadikan panghulu sebagai pemimpin ditengah masyarakat.

⁴⁹*Ibid.* Halaman 143

Kontak antara Kolonial Belanda dengan panghulu telah dimulai sebelum terbentuknya Pemerintahan Hindia Belanda di Kepulauan Nusantara yakni ketika Minangkabau kedatangan pedagang-pedagang Belanda yang membangun kontak dagang dengan penguasa lokal. Setelah Belanda melegitimasi kedudukannya di Kepulauan Nusantara dengan membentuk sebuah pemerintahan sebrang lautan Hindia Belanda. Minangkabau yang daerah cakupannya melebihi luas daerah administratif Sumbar saat ini termasuk dalam *Gouvernement Sumatra's Westkust*.⁵⁰

Hubungan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Panghulu Minangkabau semakin mesra ketika pada tahun 1821 serombongan panghulu dari daerah pedalaman Minangkabau menemui *Gouvernement Commissaris* Belanda yang bernama *Du Puy* di Padang. Tujuan kedatangan mereka adalah meminta bantuan Belanda dalam menghadapi Kaum Paderi.

Sejak akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di daerah pedalaman Sumatera Barat terjadi sebuah gerakan sosial yang ingin memurnikan kehidupan beragama Islam bagi masyarakat Minangkabau yang dinamakan Gerakan Paderi. Gerakan ini dianggap panghulu sangat membahayakan kedudukan dan eksistensi Adat Minangkabau. Pada saat ini *Du Puy* dengan segera menerima permintaan tersebut dan berjanji akan membantu rombongan panghulu tersebut, tetapi dengan imbalan yang setimpal. Keinginan *De Puy* ini terbaca oleh para panghulu. Bahkan sebelum diminta mereka telah menawarkan terlebih dahulu. Imbalannya adalah, Belanda diberi hak menjadi penguasa baru di seluruh Alam Minangkabau.⁵¹

⁵⁰ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006)

⁵¹ *Ibid.*

Imbalan dan beberapa kewajiban lainnya dari para panghulu serta bentuk bantuan yang akan diberikan oleh Belanda dicantumkan dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 10 Februari 1821. Isi perjanjian 10 Februari 1821 adalah sebagai berikut :

Pertama, kepala-kepala Pemerintahan (para panghulu) dari Kerajaan Minangkabau, secara formal dan mutlak menyerahkan Pagaruyung, Sungai Tarab dan Saruaso begitu juga daerah-daerah di sekeliling Kerajaan Minangkabau kepada pemerintahan Hindia Belanda.

Kedua, penghulu-penghulu tersebut berjanji dengan sungguh sungguh atas nama mereka dan rakyat maupun keturunan mereka untuk patuh dan taat kepada pemerintah Hindia Belanda dan sekali-sekali tidak akan menentang perintah apapun dari Belanda.

Ketiga, dalam rangka menguasai daerah-daerah yang telah diserahkan kepada Belanda, untuk melindungi rakyat dari Kaum Paderi, untuk menghancurkan kaum Paderi dan menciptakan perdamaian di Minangkabau, pemerintah Hindia Belanda menyediakan sebanyak 100 orang dan 2 pucuk meriam.

Keempat, para penghulu diharuskan menyediakan kuli-kuli dalam jumlah yang dibutuhkan dan mengurus makanan tentara dengan sebaik mungkin.

Kelima, adat dan kebiasaan lama dan hubungan penghulu dengan penduduk akan dipertahankan dan tidak akan dilanggar selama tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam perjanjian.⁵²

⁵² *Ibid*

Tegasnya lewat perjanjian itu para panghulu tersebut telah menyerahkan Alam Minangkabau kepada Pemerintah Hindia Belanda. Tidak tanggung-tanggung, para panghulu yang menandatangani surat perjanjian itu bersumpah setia dengan Al-Quran serta disaksikan oleh Regen Padang (Sutan Raja Mansyur Alamsyah) beserta wakilnya, para penghulu Kota Padang, para saudagar penting di Padang dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di Padang. Para panghulu yang menyerahkan Alam Minangkabau tersebut dipimpin oleh Daulat Yang Dipertuan Sutan Alam Bagar Syah.⁵³

Kedekatan panghulu dengan Belanda dilanjutkan dengan keluarnya Plakat Panjang pada tahun 1883, secara spesifik pada poin nomor tiga perjanjian Plakat Panjang ini disebutkan, beberapa panghulu akan diangkat menjadi wakil Pemerintah Belanda dengan imbalan gaji dari pemerintah. Mereka akan menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintah serta akan memberi segala informasi tentang orang Minangkabau kepada pemerintah.

Selain itu dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda sendiri dibentuklah sebuah Keregenan yang berdiri atas beberapa Kelarasan. Kelarasan sendiri dipimpin oleh Tuanku Laras yang dipilih berdasarkan usulan yang diajukan panghulu-panghulu dalam Kelarasan tersebut. Syarat dari seorang Laras sendiri adalah seorang panghulu. Kelarasan berdiri atas beberapa Nagari dan Nagari dibagi menjadi beberapa dusun dipimpin oleh Panghulu. Kewenangan mengangkat Kepala Nagari dan Kepala Dusun berada sepenuhnya di tangan residen.

⁵³ *Ibid.* Halaman 34

Sebagai unit pemerintahan terendah, Kelarasan, Nagari dan Dusun mempunyai fungsi yang sangat strategis. Ketiga unit, terutama sekali unit administratif Nagari “dipegang” kuat-kuat oleh pemerintah. Kebijaksanaan ini terutama sekali didasarkan oleh kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, unit inilah yang sesungguhnya yang menjadi ujung tombak pemerintah kolonial di Sumatera Barat. Unit inilah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga berbagai pesan dan kebijaksanaan politik (dan juga ekonomi) sangat efektif bila disampaikan lewat ini. Tidak itu saja, dalam laporannya *De Stuers* juga mencatat bahwa Nagari adalah garis terdepan dalam kampanye Militer melawan Paderi.⁵⁴

Pada akhir abad ke-19 di Belanda muncul sebuah gerakan yang menuntut daerah jajahan diberikan imbalan atas semua yang telah dilakukannya terhadap belanda, gerakan ini dikenal dengan Politik etis. Pada awal tahun 1930, tepatnya tahun 1933/34 rencana untuk membentuk *Minangkabau Raad*. Barangkali karena didukung *timing* yang tepat, maka rencana ini tidak mendapat tantangan dari partai partai yang bersikap *non cooperative*. Dalam sidang-sidang *Volksraad* rencana ini juga dibicarakan. Salah satu pembicaraan yang penting adalah mengenai komposisi anggotanya.⁵⁵

Sebagai imbalan atas peranan panghulu dalam pemerintahan kolonial dimasa lampau, maka diputuskan untuk memberi jatah yang lebih banyak pada kelompok ini. Dari total 49 orang anggota *Minangkabau Raad*, panghulu memiliki wakil sebanyak 22 orang. Selanjutnya, wakil-wakil partai politik, kaum agama dan berbagai organisasi sosial lainnya sebanyak 10 orang. Kelompok ketiga yang mempunyai wakil di *Minangkabau Raad* adalah kaum pegawai Bumiputra dengan

⁵⁴*Ibid.* Halaman 96

⁵⁵ *Ibid.*

6 orang. Terakhir dari wakil pemerintah Hindia Belanda dan Timur Asing sebanyak 9 orang.⁵⁶

Setelah Sekutu berhasil dikalahkan oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya, Belanda yang merupakan bagian dari sekutu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Imbasnya, Belanda harus menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Sebelum kedatangan pemimpin sipil dari Jepang, untuk wilayah Sumatera Barat pemimpin militer Jepang diberi tugas untuk menata kembali pemerintahan yang ditinggalkan Belanda. Di samping itu mereka juga dibebani tugas untuk menjaga ketertiban. Karena kekurangan tenaga, penguasa Jepang terpaksa menggunakan tenaga Bumiputra. Tiga Komponen utama masyarakat Sumatera Barat, yakni golongan Adat, nasionalis dan agama mereka pergunakan seefektif mungkin. Karena adanya perbedaan latarbelakang sosiologis yang berimplikasi pada pengaruh mereka ditengah masyarakat, maka masing-masing kelompok itu diberi tugas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Golongan adat diberi tugas untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan, kaum nasionalis diserahkan tugas untuk melancarkan propaganda, dan kaum agama ditugasi untuk membangkitkan semangat masyarakat membantu Jepang dengan mengatakan perang yang dilancarkan Jepang sebagai perang suci mengusir dan mengakhiri kekuasaan bangsa Belanda.⁵⁷

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Pemerintah republik tidak mau mengutak-atik pemerintahan Nagari, Panghulu tetap diberi tempat dalam masyarakat. Dalam prakteknya, akses

⁵⁶ Ibiid

⁵⁷ Ibiid

panghulu di pemerintahan agak terhambat oleh Pemerintah Orde Lama. Sehingga akibatnya Panghulu hanya berada pada level Nagari. Tidak banyak Panghulu yang berkiprah di Pemerintahan Orde Lama. Terbentuknya Partai MTKAAM sebagai sebuah Partai lokal yang mempunyai ide untuk menghimpun masa adat di Minangkabau dalam kenyataannya tidak menghasilkan sesuatu yang di harapkan. Partai MTKAAM hanya mampu mendudukan satu orang wakilnya di DPRST tahun 1947 yakni Dt. Simarajo. Dari total 29 anggota DPRST yang menjabat sebagai panghulu hanya tiga orang. Selain Dt.Simarajo ada juga Dt. Su'ib (Partai Murba) dan Dt. Mangku (PKI).

C. Dinamika politik di Sumatera Barat dan Kabupaten Agam pada masa Orde Lama

Sejak pemilu Anggota DPR 1955 Sumbar dikuasai oleh partai berbasis Islam modernis, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Bila PNI (nasionalis) dan NU (Islam Tradisionalis) memiliki basis yang di Jawa. Masyumi merupakan respresentasi partai luar Jawa karena pada pemilu 1955, dari 16 daerah pemilihan, Masyumi menang di 10 daerah pemilihan , PNI dan NU masing masing menang di dua daerah pemilihan, sementara Partai Masyumi menang disatu daerah pemilihan dengan Sumatera Barat sebagai basis utamanya. Tidak heran bila tokoh tokoh masyumi yang melegenda, seperti M.Natsir, berasal dari daerah tersebut. Tidak itu saja, sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan, Sumbar juga telah melahirkan Tokoh besar sekelas Hatta, Sjahrir, Agus Salim, M. Yamin, dan Tan Malaka.⁵⁸

⁵⁸ Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal, Peran Aktor Dalam Demokratisasi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009) Halaman 62

Pada Pemilu anggota DPR 1955 yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dari sebelas kursi yang diperebutkan untuk daerah pemilihan Sumatera Tengah, enam diantaranya diraih Masyumi. Tiga kursi sisanya direbut perti. Sementara PKI dan PPTI masing masing mendapatkan satu kursi. Adapun jumlah peserta pemilihan umum (pemilu) saat itu adalah 44, baik peserta yang berasal dari parpol maupun perseorangan.⁵⁹

Tokoh tokoh adat dan ulama yang tampil dalam Pemilu 1955 di Sumatera Tengah gagal menyaingi pengaruh Masyumi dan Perti. Demikian pula tokoh nasional, seperti Sutan Sjahrir, yang maju di medan pemilihan Sumatera Tengah dengan bendera Partai Sosialis Indonesia (PSI). PSI tidak berhasil mendapatkan satu kursi pun. Kursi yang diperoleh PKI dan PPTI pun sebenarnya berasal dari sisa suara yang digabungkan dengan sisa suara dua partai tersebut di daerah pemilihan lain di level nasional.⁶⁰

Tabel 1 :Hasil Pemilu 1955 di Daerah Pemilihan Sumatera Tengah
(Sumbar, Riau, dan Jambi)

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1	Masyumi	797.692	50,77	6
2	Perti	351.768	22,38	3
3	PKI	90.513	5,76	1
4	PPTI	33.156	2,25	1
5	Lain-lain	296.004	18,84	
		1.571.133	100,00	11

Sumber: Pemilu Indonesia dalam Angkatan dan Fakta Tahun 1955-1999

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

Pada pemilu 1955 ini Partai Masyumi menjadi partai pemenang pemilu, hal ini disebabkan salah satunya oleh banyaknya tokoh-tokoh Masyumi yang ada di Pusat sebut saja H. Agus salim, Hamka, M. Natsir dan banyak lagi. Selain itu Sumatera Tengah merupakan salah satu daerah yang mayoritas beraliran Islam Modernis yang senafas dengan Masyumi. Urutan kedua ada Perti, Perti mendapatkan suara yang cukup banyak di Sumbar karena basis politik Perti ialah masyarakat yang tergabung dalam Tarbiyah Islamiyah yang cukup banyak ada di Sumatera Barat terutama di daerah Agam, Pariaman, Tanah Datar dan Limo puluh kota. Urutan selanjutnya PKI dan PPTI, kedua partai ini tidak memperoleh suara cukup banyak di Sumatera tengah karena ideologi yang mereka tawarkan tidak sepopuler Partai Masyumi dan Perti. Partai Adat Rakyat dan Partai MTKAAM sendiri masuk dalam kategori jumlah suara lain-lain

Dalam pemilu 1955 digunakan sistem proporsional. Cara penghitungan kursi dilakukan dalam tiga tahap. Tahap *pertama*, pembagian kursi di daerah pemilihan masing masing dengan cara membagikan perolehan suara peserta pemilu dengan bilangan pembagi pemilihan (BPP) atau yang pada waktu itu dikenal *kiesquotient*. *Kiesquotient* diperoleh dengan cara membagi suara sah di satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi didaerah pemilihan tersebut. Untuk Sumatera Tengah *kiesquotient*-nya adalah 142.830. PKI dan PPTI tidak mencapai angka *kiesquotient*.

Tahap *kedua*, sisa suara peserta pemilu yang tidak terbagi ke dalam kursi diangkat ke level nasional, digabungkan dengan sisa suara didaerah pemilihan lain. Pada level ini BBP kembali ditetapkan dengan membagi sisa suara semua peserta pemilu dengan sisa kursi yang belum habis terbagi. Tahap *ketiga*, bila

masih terdapat sisa kursi yang belum habis terbagi pada tahap kedua, sisa kursi tersebut diberikan kepada peserta pemilu yang memiliki sisa kursi terbanyak.

Cerita Masyumi sebagai parpol kedua terbesar setelah PNI pada pemilu 1955 berakhir ditangan ditangan rezim Demokrasi Terpimpin Sukarno menyusul keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam rangka penyerdahanan jumlah parpol, Sukarno mengeluarkan Kepres no. 128 tahun 1960 yang menyatakan bahwa parpol yang diakui pemerintah adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), PSII, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), IPKI, Perti dan Murba. Parpol parpol yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah Sukarno, tidak diakui dan dibubarkan, termasuk didalamnya Masyumi dan PSI. Pada tahun 1965 giliran Murba yang dibekukan oleh pemerintahan Orde Lama.⁶¹

Arena Politik pada Demokrasi Terpimpin diwarnai permainan segitiga kekuasaan Bung Karno, Angkatan Darat, dan PKI dengan Sukarno sebagai pusat permainan tersebut. Partai dan basis partai menjadi hancur. Kondisi ini semakin menjadi jadi ketika rezim Orde Lama tumbang dan digantikan dengan rezim baru yang menyebut dirinya sebagai Orde Baru. Sebagai kekuatan terakhir partai warisan era parlementer (1945-1959) PKI dibubarkan menyusul terjadinya peristiwa G 30 S PKI.⁶²

Upaya merevitalisasi partai-partai lama warisan era parlementer di luar PKI pada pemilu 1971, pemilu pertama pada era Orde Baru, tidak cukup kuat. Pemilu itu sendiri ditunda-tunda pelaksanaannya karena penguasa Orde Baru tengah mempersiapkan kendaraan politiknya yang bernama Sekretariat Bersama

⁶¹ Ibid. Halaman 64

⁶² Ibid

Golongan Karya (Sekber Golkar, untuk ikut dan memenangkan pemilu. Sebagaimana diketahui, Sekber Golkar kemudian menjelma menjadi Golkar, tanpa embel-embel atau predikat partai politik didepan namanya. Dengan kekuasaan yang tidak tertandingi, pemerintah Orde Baru pun melanjutkan kebijakan penyerdehanaan parpol yang dilakukan rezim Demokrasi Terpimpin. Hanya sembilan parpol (di luar PKI) yang disebut dalam Kepres No. 128 Tahun 1960 yang diperbolehkan ikut pemilu. Bila Murba yang sempat dibekukan pada tahun 1965 direhabilitasi oleh rezim Orde Baru tidak demikian halnya dengan Masyumi dan PSI. Pelarangan kedua parpol tersebut tidak dicabut hingga tumbangnya rezim Soeharto, 21 mei 1998.⁶³

Pada pemilu 1971 memperlihatkan kemenangan besar Golkar atas sembilan kontestan lainnya, termasuk di Sumbar. Dari 14 kursi DPR yang diperebutkan di Sumbar, Golkar merebut 9 kursi, Parmusi 2, sementara Perti dan NU masing mendapatkan 1 kursi.

Tabel 2 : Hasil Pemilu 1971 untuk Pemilihan Anggota DPR di Sumatera Barat

No.	Partai	Suara	Persen	Kursi
1.	Golkar	761.163	63,22	9
2.	Parmusi	273.196	22,70	3
3.	Perti	83.566	6,94	1
4.	NU	35.889	2,98	1
5.	Lain-lain	50.099	4,16	
		1.203.915	100,00	14

Sumber : Pemilu Indonesia dalam Angkatan dan Fakta tahun 1955-1999

⁶³ Ibid

Hasil Pemilu 1971 memperlihatkan kemenangan Golkar yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan partai-partai lain. Padahal sebelumnya banyak orang yang memprediksikan jika partai Islam jelmaan Masyumi yakni Parmusi yang akan menang. Kemenangan Golkar ini memperlihatkan keberhasilan Golkar dalam pembentukan opini positif dan menghimpun basis masa di daerah-daerah Sumatera Barat.

Parmusi pada tahun 1971 hanya menduduki posisi kedua, kegagalan Parmusi untuk mengulang kemenangan besar pendahulunya Masyumi disebabkan banyaknya massa yang beralih kepada Golkar. Sedangkan Perti dan Partai NU juga tidak mendapatkan hasil yang memuaskan karena mayoritas suara mereka berhasil direbut oleh Golkar.

Setelah perhelatan pemilu 1971 proyek penyerderhanaan parpol makin menjadi-jadi. Pemerintah melakukan fusi empat parpol berbasis Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lima partai nasionalis dan Partai Kristen kedalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PPP yang terbentuk pada tanggal 5 Januari 1973 merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti, sementara itu, PDI merupakan gabungan PNI, Parkindo, Partai Katolik, dan Murba.

Penyerderhanaan partai politik era Orde Baru dibalut dengan aturan perundang-undangan yang hanya mengakui tiga kontestan pemilu setelah pemilu 1971, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.⁶⁴ Cerita tentang Orde Baru kemudian adalah cerita tentang kemenangan Golkar dari pemilu ke pemilu seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Sumbar. Bahkan pada pemilu pada pemilu terakhir Orde Baru (1997), kekuatan parpol di luar Golkar di Sumbar benar benar hancur. Golkar

⁶⁴ UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

berhasil meraup 91,15% dari 2.249.792 suara yang diperebutkan. PPP hanya mampu merebut 7,74% suara dan PDI 1,11%. Dari 14 kursi DPR yang diperebutkan 13 diantaranya diborong Golkar dan satu kursi bagi PPP. Adapun PDI tidak berhasil merebut satu kursi pun.⁶⁵



⁶⁵ Biro Humas Komisi Pemilihan Umum, *Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta tahun 1955-1999* (Jakarta: Biro Humas KPU RI, 2000) halaman. 166.

BAB III

KETERLIBATAN PANGHULU DALAM POLITIK ORDE BARU

DI KABUPATEN AGAM, 1971-1998

A. Penghulu dan LKAAM Pada Masa Orde Baru

Sejak tahun 1916 telah ada organisasi *niniak-mamak* untuk mengembangkan adat dan budaya Minangkabau. Organisasi ini bernama Serikat Adat Alam Minangkabau (SAAM).⁶⁶ SAAM didirikan pada tanggal 18 November 1916 di Padang oleh Sutan Maharadja. Munculnya SAAM pada masa penjajahan Belanda diibaratkan sebagai ujung tombak kaum adat. SAAM bertujuan untuk mempertahankan adat dan melestarikan adat Minangkabau.⁶⁷

Pada tahun 1937 berdiri pula Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) yang merupakan hasil dari kongres pemangku adat yang diadakan di Simabur. Setelah lebih kurang lima tahun berdiri masalah penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang membubarkan beberapa organisasi di Minangkabau seperti Komite Rakyat, Pemuda Nippon Raya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan MTKAAM.⁶⁸ Pada awal Indonesia merdeka, MTKAAM muncul kembali. Majelis Kerapatan Adat ini telah memperlihatkan peranannya dalam mempertahankan kepentingan komunitas etnik ketika Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak lagi dimasukkan menjadi bahagian dari kepemimpinan Nagari dalam Maklumat Residen Sumatera Barat No. 20 dan 21 tanggal 21 Mei

⁶⁶ Taufik Abdullah, "Sekolah dan Politik: "Gerakan Kaum Muda Di Sumatera Barat (1927-1933)" terj. A. Guntur dan Lindayanti, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1998) halaman 14.

⁶⁷ Wan Anwar Wan Muhammad, "Serikat Adat Alam Minangkabau : "Keberadaan Sebagai Sebuah Organisasi dan Perjuangan Mempertahankan Adat Minangkabau (1916-1935)", *Skripsi* (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1992). Halaman 26.

⁶⁸ Audrey Kahin, "Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950" (Sumatera Barat : MSI Cabang Sumatera Barat, 1997). Halaman 18-19.

1946. Pada Pemilu pertama 1955, organisasi ini bahkan menjadi satu kekuatan politik di Sumatera Barat. Setelah Ninik-mamak mendirikan Partai MTKAAM (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau)⁶⁹

Pada masa Orde Lama, para ninik mamak/pemangku adat menjadi sasaran “pengganyangan” PKI. Ninik mamak sungguh dilecehkan dengan sebutan sebagai setan desa, kaum feodal, tuan tanah yang harus dienyahkan di Bumi Indonesia. Kalau ada ninik mamak mengatakan bahwa kasus pegang gadai belum selesai, maka ninik mamak dicap sebagai unsur kontra revolusi yang harus diganyang. Dianggap pemberontak, dicap sebagai anggota partai terlarang Masjumi dan PSI, agen Neokolim dan sebagainya.⁷⁰ Pasca PRRI, Kodam 17 Agustus merekrut 4500 anggota PKI untuk bergabung dalam pasukan. Hal ini dilakukan karena pasukan yang ada sebelumnya di Sumatera Barat membelot kepada PRRI. Hal ini menyebabkan PKI mempunyai pengaruh sangat besar dalam politik Sumatera Barat. Salah satu kebijakan PKI adalah menghilangkan pengaruh Panghulu dan Ulama karena dianggap sebagai setan desa. PKI juga membakar Istana Pagaruyuang karena dianggap sebagai simbol feodal.⁷¹

Ketika masa Orde Baru situasi mulai berubah dengan terbentuknya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). LKAAM ialah sebuah organisasi yang merupakan tempat penyaluran aspirasi komunitas adat masyarakat Minangkabau dalam hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai adat dalam

⁶⁹ Syafrizal, dkk. *Ninik-mamak dalam perubahan politik Di Sumatera Barat pada awal Orde Baru*, Jurnal analisis Sejarah (Padang: Labor Sejarah Universitas Andalas, 2010), halaman 46

⁷⁰ Makalah H.Karmadi Rais Dt.Simulie. 2007. *Cuplikan sejarah singkat lahirnya LKAAM Sumbar*. Padang

⁷¹ Wawancara dengan Saafroedin Bahar Kebayoran Lama Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2012 jam 13.00-15.30

masyarakat.⁷² Pembentukan wadah organisasi LKAAM bukanlah muncul dari masyarakat, akan tetapi merupakan inisiatif dari aparat pemerintah, yaitu berawal dari munculnya gagasan dari kalangan Militer yakni Letjen TNI Ahmad Junus Mokoginta yang merupakan Panglima Komando Antar Daerah dan Panglima Kodam III/17 Agustus.⁷³

Letjen Junus Mokoginta mempunyai pemikiran bahwa untuk melakukan pembersihan PKI di Sumatera Barat diusahakan tidak melalui pertumpahan darah, seperti halnya terjadi di Pulau Jawa dan Bali, yang begitu emosional dan garang. Letjen Mokoginta lalu mengusulkan ide percepatan pembangunan dan rehabilitasi ini ke pusat. Mokoginta tidak ingin Sumbar hancur karena pada saat itu Sumbar menjadi daerah penghasil devisa, untuk itu dibentuklah Kopan (Komando Harapan). Tindak lanjut dari kebijakan itu ialah diadakannya perundingan dengan Panghulu dan Ulama di Sumatera Barat.⁷⁴

Hasilnya diadakanlah Musyawarah Besar pada tanggal 18-19 Maret 1966 di aula Kodam 17 Agustus. Mubes tersebut melahirkan Badan Kontak Perjuangan Ninik Mamak Pemangku Adat, dengan suatu nama tambahan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Dalam perkembangannya nama LKAAM lebih populer, sehingga nama BKPNM menjadi hilang.

Pada awalnya masyarakat Sumatera Barat sangat optimis dengan dibentuknya wadah LKAAM ini, karena dengan demikian berbagai kepentingan komunitas adat akan terlindungi dari intervensi kepentingan-kepentingan di luarnya, yang dengan itu pula eksistensinya akan tetap terpelihara di tengah-

⁷²*Ibid.* halaman 2

⁷³ Wawancara dengan DT. Sati Nan Tuo Palembang pada tanggal 5 Juli 2012 jam 13.30-14.45.

⁷⁴ Wawancara dengan Saafroedin Bahar Kebayoran Lama Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2012 jam 13.00-15.30

tengah perubahan-perubahan politik di negara ini. Hal ini memang sejak lama diidamkan oleh masyarakat, khususnya sejak nagari-nagari tidak lagi memiliki otonomi atas wilayahnya oleh karena adanya struktur supra nagari yang memiliki otoritas yang lebih kuat.⁷⁵

Pada Periode awal terbentuknya, LKAAM sendiri dipegang oleh Chaidir Nien Latif DT Bandaro sedangkan Saafroeddi Bahar (perwira Kodam) yang sekaligus Ketua DPD Golongan Karya juga duduk dalam sekretariat LKAAM sendiri. Chaidir Nien Latif DT. Bandaro tidak sampai setahun memimpin LKAAM karena pada tahun ini itu juga ia dipindah tugaskan sebagai Kepala Eksploitasi Kereta Api Sumatera Selatan.

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Chaidir Nien Latif sebagai Ketua LKAAM. Program LKAAM hanya lebih difokuskan pada penggantian panghulu yang terlibat PKI dan membentuk LKAAM Tingkat II. Selain itu Chaidir Nien Latif juga focus dalam menyusun kepengurusan yang dia pimpin.

Ketua LKAAM Ke-2 dipilih pejabat daerah yang sudah dikenal, baik oleh masyarakat maupun oleh pejabat tingkat provinsi, yaitu Baharudin DT. Rangkayo Basa juga seorang mantan tentara pelajar. Dalam kepemimpinannya, ia didampingi oleh Saafroedin Bahar sebagai sekretaris umum LKAAM. LKAAM pada masa Baharudin DT. Rangkayo Basa, lebih diwarnai dengan kegiatan-kegiatan politik untuk menghadapi pemilu 1971.⁷⁶

Selanjutnya Mawardi Yunus DT. Rajo Mangkuto yang juga menjabat sebagai Rektor Unand terpilih sebagai Ketua LKAAM periode Ke-3 dan Ke-4

⁷⁵ H.Karmadi Rais, *Op.Cit* halaman 2

⁷⁶ Yesmawati, "*Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat 1966-2004*", *Skripsi* (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2006), halaman 34.

dengan masa jabatan 1974-1984. Pada masa itu program LKAAM lebih difokuskan pada peningkatan peran ninik mamak dalam menyukseskan Repelita II dan Repelita III dan Niniak mamak ikut serta memenangkan Pemilu untuk kemenangan Orde Baru.⁷⁷

Jika dilihat dari strukturnya kepemimpinannya, organisasi ini lebih banyak berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan Golongan Karya. Sebagai penyangga kepentingan pemerintah, menjelang Pemilu 1971 organisasi ini telah memperlihatkan peran aktifnya dalam mensosialisasikan kekuatan politik Orde Baru, dalam mencari dukungan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Dalam usaha menyukseskan pemilu 1971, Mubes LKAAM se-Sumatera Barat yang diadakan pada 26-27 Juli 1970, menghasilkan beberapa keputusan antara lain bergabungnya LKAAM ke dalam Golkar, dan semua anggota LKAAM bertekad memenangkan Golkar dalam Pemilu 1971 di Sumatera Barat.⁷⁸ Sehingga sejak Pemilu 1971 semua anggota LKAAM memberikan suaranya pada Golkar.

Untuk memperkokoh posisi LKAAM dalam usaha memenangkan Golkar, maka diadakan pula pertemuan di Padang awal Januari 1971, yang dihadiri oleh seluruh niniak mamak dan wali nagari di Sumatera Barat. Dihadapan niniak mamak dan wali nagari tersebut, Ketua LKAAM Baharudin DT. Rangkayo Basa dan Ketua Kokamendagri Sumatera Barat Raden Soekarman menandatangani

⁷⁷ Ibid. Halaman 35

⁷⁸ Syafrizal, *Op.Cit.* halaman 54

Ada cerita menarik yang di ungkapkan oleh Saafroedin Bahar ketika muasyawah yang menghasilkan pernyataan sikap panghulu mendukung Golkar dalam pemilu 1971 :

“Dalam pembahasan awal para Panghulu yang diundang dalam musyawarah pada awalnya ingin memilih partai Islam karena memang Sumbar pada Pemilu sebelumnya selalu dimenangkan oleh Partai Masyumi. Pada akhir musyawarah Panghulu membulatkan kesepakatan untuk memilih Golkar, karena di dalam Golkar panghulu telah mendapatkan pengakuan sejak reshuffle DPRD-GR pada tahun 1956 dalam golongan kekaryaan.⁸⁰

Selain dengan kokamendagri, LKAAM juga menggalang kerja sama dengan para ulama yang tergabung dalam GUPPI. Pertemuan LKAAM dengan ulama diadakan di Bukittinggi. Didalam piagam ini dinyatakan bahwa panghulu dan alim ulama di Sumatera Barat adalah *seyun selangkah, barek sapikue-ringan sajinjang* dalam melaksanakan amar nakruf nahi munkar.⁸¹

Sementara itu Mubes bersama panghulu dan alim ulama di Bukittinggi juga mengeluarkan pernyataan bersama untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar NKRI.⁸² Dalam pernyataan tersebut, niniak mamak dan ulama bertekad memenangkan Golkar dan menganjurkan anak kemenakan nagari untuk juga memenangkan Golkar dengan menusuk terhadap gambar “*pohan beringin*”.⁸³ Niniak mamak dan alim ulama melaksanakan dengan penuh kesanggupan segala program pemerintah dalam

⁸⁰ Wawancara dengan Saafroedin Bahar Kebayoran Lama Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2012 jam 13.00-15.30

⁸¹ Haluan, 10 Juni 1971

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

LKAAM sebagai organisasi adat bentukan pemerintah dalam anggaran dasarnya, dicantumkan bahwa tujuan organisasi ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai luhur Adat Minangkabau serta mengembangkan filsafat Adat Minangkabau yaitu : Adat Basandi Syar', Syara' Basandi Kitabullah.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi kultural, wilayah kerja organisasi ini ternyata tidak meliputi semua wilayah kultural Minangkabau, akan tetapi hanya mengikuti batasan wilayah teritorial propinsi Sumatera Barat. Induk Organisasi ini berada di ibukota propinsi dan secara hirarkhis mempunyai cabang di setiap Daerah tingkat II Kabupaten/Kotamadya dan di tingkat Kecamatan. Untuk tingkat Nagari, ada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tidak mempunyai hubungan struktural secara langsung dengan LKAAM tingkat Kecamatan, tetapi hanya bersifat kordinasi saja, terutama menyangkut program-program yang dilaksanakan di tingkat pedesaan.⁸⁴

Pada struktur kepengurusan lembaga ini, selain terdiri dari unsur-unsur pemuka adat, pemuka agama dan tokoh cendikiawan, juga terdapat unsur pemerintahan daerah. Struktur kepengurusan LKAAM pada awal berdirinya terdiri dari : Payung Panji, Presidium, dan Badan Pekerja Harian. Sedangkan unsur pemerintahan daerah, dalam struktur kepemimpinan priode awal, menduduki posisi sebagai Payung Panji. Duduk sebagai Payung Panji pada waktu ini antara lain : Panglima Kowilhan I Sumatera, Panglima Kodam III/17 Agustus, dan Gubernur Kepala Daerah sendiri. Struktur ini juga berlaku di setiap kepengurusan LKAAM di daerah tingkat II dan seluruh kecamatan.

⁸⁴ Wawancara dengan Syukirman DT.Tumbijo, Anggota DPRD Kabupaten Agam periode 1992-1997. pada tanggal 29 Januari 2012 jam 10.00-11.30 di Koto Tinggi.

Ketika tahun 1974 mulai terjadi perubahan struktur kepemimpinan pada lembaga ini. Istilah Payung Panji tidak lagi muncul dalam susunan kepengurusannya. Pada priode 1974-1978 struktur kepengurusannya terdiri dari tiga komponen, pertama : Dewan Pucuk Pimpinan, yaitu Ketua Umum, Wakil Ketua, Anggota, dan Penasehat, kedua : Pimpinan Harian, yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Pembantu Umum. Sedangkan unsur ketiga adalah Lembaga Pembinaan Adat dan Syarak, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pada waktu ini, setidaknya secara struktural, sudah terlihat ada kemandirian pada lembaga ini dengan tidak masuknya unsur pemerintah daerah di dalam susunan kepengurusannya. Namun bukan berarti bahwa tidak ada intervensi ke dalam kelembagaan ini. Sejak awal, organisasi ini telah mengikatkan diri untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada Golongan Karya. Ini artinya adalah loyalitas untuk pemerintah daerah, dan sangat tidak mungkin untuk menempatkan dirinya pada posisi yang berseberangan dengan pemerintah daerah. Karena itu, pada waktu pemerintah daerah menetapkan Jorong menjadi Desa yang mengakibatkan disfungsi sistem Nagari, ternyata tidak menimbulkan reaksi yang begitu berarti dari lembaga ini .

Perubahan yang drastis dari kepengurusan LKAAM justru terlihat pada dua priode terakhir, dimana Gubernur Kepala Daerah langsung memegang kendali lembaga ini sebagai Ketua Umum dan Assisten Gubernur menduduki jabatan Ketua I. Seiring dengan perubahan ini pula, Musyawarah Besar LKAAM juga menghasilkan beberapa perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi ini. Di antara perubahan yang dianggap mendasar adalah

Tangga organisasi ini. Di antara perubahan yang dianggap mendasar adalah mengenai asas organisasi yang pada awalnya adalah: "Pancasila dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" diganti dengan Pancasila saja tanpa mencantumkan dasar falsafah adat itu .

Sebagai organisasi kemasyarakatan, LKAAM dalam perkembangannya tidak lepas dari berbagai dinamika tarik menarik kepentingan. Sebagai mitra pemerintah yang hidup dengan satu-satunya sumber dana dari bantuan pemerintah daerah , ia harus menunjukkan loyalitas bagi kepentingan pemberi dana itu sendiri. Namun sebagai organisasi yang menyandang simbol komunitas etnis Minangkabau, juga tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya dari segala persoalan kultural yang muncul dalam komunitas ini.⁸⁵

Dalam perjalanannya, organisasi LKAAM ini telah memperlihatkan perannya dalam rangka meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan Minangkabau melalui berbagai program pembinaan-pembinaan dan penyebaran pengetahuan adat Minangkabau, baik melalui ceramah, penataran, serta mengupayakan kerjasama dengan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukan pelajaran adat sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah menengah di Sumatera Barat. Meskipun secara umum program-program yang telah dijalankan itu tidak banyak memperlihatkan hasilnya, sebagaimana yang terlihat pada realitas sosial pada dasa warsa terakhir, namun hal ini setidaknya menunjukkan keberhasilan lembaga ini dalam meyakinkan pemerintah

⁸⁵ Wawancara dengan Syukirman Dt.Tumbijo, Anggota DPRD Kabupaten Agam tahun 1992-1997. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Januari 2012 jam 10.00 di Koto Tinggi.

Di sisi lainnya juga terlihat bahwa lembaga ini secara akomodatif telah memanfaatkan otoritasnya di bidang adat ini dalam mensukseskan pembangunan daerah sendiri. Beberapa di antaranya yang dapat ditunjukkan adalah dalam memasyarakatkan Perda No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, lembaga ini telah mendampingi kunjungan kerja pemerintah daerah ke daerah-daerah tingkat II. Hal ini tentunya dalam rangka memberi pengertian-pengertian kepada masyarakat komunitasnya tentang "maksud baik" pemerintah dengan dikeluarkannya Perda tersebut. Demikian juga peran yang tidak sedikit diberikan oleh lembaga ini dalam mensukseskan program peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan tanah-tanah ulayat sebagai lahan penanaman modal para investor di Sumatera Barat, menyukseskan program IDT, dan yang tak kalah pentingnya adalah menyukseskan Pemilihan Umum dan memenangkan Orde Baru .

Dari apa yang telah dikemukakan dapat dilihat bahwa kehadiran lembaga ini tidak lebih banyak perannya dalam membangkitkan nilai-nilai kultural komunitasnya, dibanding dengan program-program bernuasa kultural yang diberikan untuk melegitimasi program-program pemerintah yang dijalankan. Karena itu, tidak mengherankan bila kehadiran LKAAM hingga saat ini tidak semakin meningkatkan kesadaran sosial masyarakat di Sumatera Barat terhadap adat Minangkabau, apalagi untuk peningkatan implementasi komitmen Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Sepak terjang LKAAM di Kabupaten Agam sealur dengan apa yang diperankan oleh LKAAM di kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Barat. Pembentukan LKAAM Kabupaten Agam ini berawal dari mubes yang

“Ketika panghulu menjadi ketua LKAAM di Kabupaten Agam maka artinya beliau adalah salah satu pejabat penting di Agam. Contohnya adalah DT. Panghulu Basa yang ketika menjabat Ketua LKAAM Agam, beliau juga seorang Ketua DPRD Kab.Agam. Sedangkan untuk tingkatan Kecamatan, seorang Ketua KAN akan dipertimbangkan untuk menjadi anggota DPRD Kab.Agam. Saya adalah salah satu contohnya, ketika menjabat sebagai Ketua KAN Kecamatan Palembayan langsung ditawarkan untuk ikut pelatihan calon anggota legislatif di Bukittinggi”.⁸⁸

Dalam kasus lain di Kecamatan Palupuah, panghulu yang menjabat di KAN Kecamatan juga punya kesempatan yang lebih besar untuk menduduki jabatan anggota legislatif Kabupaten Agam. Salah satunya adalah DT.Maleka Nan Tinggi, DT. Maleka Nan tinggi mengungkapkan dalam wawancara yang penulis lakukan dikediaman beliau ;

“ Katiko inyiak manjabat sebagai Ketua KAN Kecamatan Palupuah, inyiak dianggap sukses dalam menjalankan tanggung jawab tu. Sampai pado satu acara, Inyiak ditawar jo Pak Bupati Agama M.Nur Syafei untuk menjadi anggota dewan”

(Ketika saya menjabat sebagai Ketua KAN Kecamatan Palupuah, Bupati Agam pada masa itu M. Nur Syafei menawarkan saya untuk menjadi anggota DPRD Kab.Agam”).)

Bisa kita lihat dari kalimat diatas bahwa penunjukan seorang anggota DPRD bisa dilakukan dengan mudah oleh Bupati. Sedangkan pemilihan umum hanya menjadi sebuah simbolik saja dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya oleh Bupati yang merupakan pimpinan daerah.

Posisi panghulu dalam LKAAM maupun KAN menjadi sebuah posisi strategis ditengah masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak panghulu yang berminat untuk mendudukinya. Ketika mereka telah masuk LKAAM maka jalur

⁸⁸ Wawancara dengan DT. Sati Nan Tuo, Anggota DPRD Kabupaten Agam periode 1992-1997. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2012 di Palembayan jam 13.30

dilaksanakan pada tahun 1970, M. Th. Dt. Panghulu Basa dipercayai sebagai Ketua LKAAM Kabupaten Agam.⁸⁶

Pada saat Pemilu pertama 1971, LKAAM Kabupaten Agam bersinergi dengan pemerintah, Golkar dan ABRI untuk ikut mendukung pembangunan dengan cara memenangkan Golkar di Kabupaten Agam. Hal ini sejalan dengan pernyataan sikap LKAAM yang pada Mubeslub pada tahun 1970, menyatakan mendukung Golkar.

LKKAM Kab.Agam mengintruksikan seluruh KAN yang berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Agam untuk ikut andil mendukung Golkar. Pada saat itu para panghulu yang berada di KAN dikerahkan untuk mengajak anak kemenakan memilih Golkar. Seruan seruan panghulu ini gencar dilakukan di nagari-nagari kabupaten Agam, mayoritas panghulu menjadi corong Golkar.

Intruksi terhadap ninik mamak ini secara lisan juga ditegaskan oleh Bupati Agam M. Nur Syafei dengan kalimatnya "*Jiko mamak lah maanguak mako kamanakan ampek kali angguaknyo*" artinya jika mamak/panghulu telah mengganggu maka kemenakan empat kaling anggukannya. Maksud dari kalimat ini jika ninik mamak telah menyatakan mendukung Golkar maka kemenakan akan mengikuti sikap mamak.⁸⁷

Keterlibatan panghulu di LKAAM juga akan menjadi sebuah pertimbangan bagi Golkar untuk mengangkat serorang panghulu menjadi

⁸⁶ Doni Ansyah P. Anwar, dkk, *Profil Tokoh, Aktifis, dan Pemuka Masyarakat Minang* (Jakarta: PT. Permo Promotion, 1995) Halaman 363

⁸⁷ Wawancara dengan DT. Maleka Nan Tinggi, Anggota DPRD Kabupaten Agam (1987-1992, 1992-1997 dan Komisari Golkar Kec. Palupuah 1982-1993) pada tanggal 25 Juli 2012

berminat untuk mendudukinya. Ketika mereka telah masuk LKAAM maka jalur untuk menduduki jabatan di legislatif tidak lagi sulit, tinggal bagaimana panghulu tersebut membuktikan kinerjanya di lapangan.

B. Panghulu dan Partai politik di Kabupaten Agam.

1. Panghulu dalam Golkar

Pasca lengsernya Orde Lama terjadi perubahan konstelasi politik yang besar diseluruh wilayah Indonesia. Dinyatakannya PKI sebagai partai terlarang oleh pemerintah Orde Baru membuat banyak kalangan yang merasa diuntungkan. Panghulu merupakan salah satu yang diuntungkan dalam kebijakan ini, karena sebelumnya panghulu dianggap sebagai kelompok feodal yang kontra revolusioner oleh PKI. Angin segar yang ditiupkan Orde Baru ini menjadi sebuah kesempatan besar yang dilihat oleh Panghulu untuk ikut ambil bagian dalam politik Orde Baru.

Pemerintah Orde Baru juga menangkap apa yang diinginkan oleh mayoritas panghulu, dengan dibentuknya LKAAM di Bukittinggi. Pemerintah Orde baru mulai mengajak para tokoh tokoh panghulu untuk ikut bergabung dengan Golkar. Untuk di Kabupaten Agam sendiri tokoh-tokoh Panghulu bersepakat untuk bergabung dengan Golkar. Sebut saja beberapa nama seperti DT.Panghulu Basa, H.Zubir DT.Muncak, M. DT.Rajo Nan Panjang, Erman DT.Rangkayo Basa dan tokoh-tokoh lain.

Masuknya tokoh-tokoh adat di Kabupaten Agam ini menjadi babak baru keterlibatan elit tradisional di Kab.Agam dalam percaturan politik Orde baru. Hal ini juga berdampak banyaknya panghulu yang mengikuti jejak para ninik mamak yang telah masuk Golkar. Pada tahun 1976 untuk di kecamatan Palembayan dari

255 jumlah panghulu, mayoritas bergabung dengan Golkar⁸⁹. Banyaknya panghulu yang bergabung dengan Golkar menjadi Golkar cepat diterima oleh masyarakat.

Golkar bergerak cepat dalam menyusun kepengurusan di kecamatan-kecamatan dan nagari-nagari di Kab.Agam. Para panghulu yang dianggap berpengaruh dan berkapasitas di bidang politik direkrut untuk menjadi pengurus baik itu di nagari maupun sebagai komisariat kecamatan.⁹⁰ Hal ini tentu menjadikan Partai Golkar cepat diterima oleh masyarakat di nagari nagari.

Selain dengan cara persuasif, politik otoritarian Orde Baru juga berlaku dalam mengarahkan panghulu untuk ikut dengan Golkar. Panghulu yang tidak mau bergabung dengan Golkar ditakut-takuti dengan ancaman penghilangan malam dan ancaman tindakan represif oleh pemerintah.⁹¹ Hal ini tentu membuat sebagian panghulu yang tidak suka dengan Golkar harus memilih jalan diam atau tidak ikut serta dalam politik.

2. Panghulu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ketakutan akan ancaman-ancaman yang disebar kepada panghulu tidak berlaku kepada Para panghulu yang berasal dari Masyumi. Partai Masyumi yang sebelum dibubarkan oleh Orde Lama menjadi pemenang di Kabupaten Agam masih menyisakan kader-kader yang loyal dan tak takut ancaman apapun.

⁸⁹ Wawancara dengan DT.Sati Nan Tuo, Anggota DPRD Kabupaten Agam periode 1992-1997. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2012 di Palembang jam 13.30

⁹⁰ Wawancara dengan Syukirman Dt.Tumbijo, anggota DPRD Kabupaten Agam periode 1992-1997. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Januari 2012 di Koto Tinggi.

⁹¹ Wawancara dengan DT. Maleka Nan Tinggi, Anggota DPRD Kabupaten Agam (1987-1992, 1992-1997 dan Komisari Golkar Kec. Palupuah 1982-1993). Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012 jam 13.00.

masih menyisakan kader-kader yang loyal dan tak takut ancaman apapun. Panghulu-panghulu seperti ini ditemukan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Tanjung Raya.

Menurut istilah DT. Maleka Nan Tinggi, panghulu di tiga daerah ini tidak takut dengan ancaman dan moncong senjata.⁹²

Pemerintah Orde Baru seakan tumpul dalam menghadapi panghulu berhaluan hijau di tiga kecamatan ini. Salah satu tokoh yang sangat keras dalam menentang hegemoni Orde Baru adalah Manjas DT. Baso Balimo yang berasal dari Tilatang Kamang. Beliau menjadi lawan berat DT. Panghulu Basa yang saat itu menjadi Ketua Golkar Kabupaten Agam sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Agam. Sepak terjang DT. Baso Balimo dalam konstelasi politik di Kabupaten Agam memunculkan kekaguman oleh masyarakat.⁹³

Keterlibatan beberapa panghulu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini idealnya menjadi penyeimbang di parlemen dan pemerintahan daerah, tetapi dalam realitanya jumlah kursi yang diperoleh oleh Partai berlambang Ka'bah ini tidak terlalu signifikan. Hal ini tentu memunculkan banyak pertanyaan kenapa hal ini bisa terjadi. PPP yang merupakan bentuk lain dari Partai Masyumi yang dulunya menjadi pemenang di Kab. Agam saat ini hanya memperoleh beberapa kursi. Hal ini ternyata disebabkan oleh kuatnya intervensi politik yang dilakukan oleh pemerintah dan kader Golkar kepada pemilih PPP. Selain itu juga disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan panitia penghitungan suara sewaktu menghitung

⁹² Wawancara dengan DT. Maleka Nan Tinggi Anggota DPRD Kabupaten Agam (1987-1992, 1992-1997 dan Komisari Golkar Kec. Palupuah 1982-1993) ,, pada tanggal 25 Juli 2012 jam 13.00

⁹³ Wawancara dengan Arman St. Pamenan di Baso pada tanggal 25 Agustus 2012 jam 10.00

suara dengan cara melobangi gambar partai lain jika yang dipilih rakyat itu adalah PPP.

3. Panghulu dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

PDI menjadi partai yang paling minim mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Agam. Penulis tidak menemukan satupun panghulu yang bergabung dengan partai yang berhaluan nasionalis ini. Salah satu nama yang muncul adalah Susilo Sutan kayo yang pernah menduduki kursi legislatif di Kabupaten Agam pada periode 1992-1997. Minimnya suara yang diperoleh oleh PDI salah satunya diakibatkan adanya isu yang sengaja disebar dalam bentuk pamphlet-pamflet yang mengatakan kalau PDI merupakan jelmaan partai komunis.⁹⁴ Isu yang sengaja disebar oleh simpatisan Golkar ini berhasil membuat mayoritas masyarakat Kabupten Agam yang terkenal dulunya sangat memegang agama menjadi antipati terhadap PDI.

Masyarakat yang antipati kepada PDI bahkan menjelang kampanye mereka akan merobek pamflet PDI yang ditempel di rumah mereka. Jika melirik kebelakang, PDI merupakan hasil dari gabungan partai-partai nasionalis dan sosialis yang dicap sebagai partai komunis sehingga stigma komunis dan anti agama masih melekat pada partai ini. Kebencian Masyarakat pada komunis disebabkan pengetahuan yang terbatas pada masyarakat yang mengidentikkan komunis dan sosialis adalah anti agama.

⁹⁴ Wawancara dengan DT. Maleka Nan Tinggi Anggota DPRD Kabupaten Agam (1987-1992, 1992-1997 dan Komisari Golkar Kec. Palupuah 1982-1993) ,, pada tanggal 25 Juli 2012 jam 13.00

C. Panghulu dan Pemilu pada masa Orde Baru

Pemilihan umum (Pemilu) disebut juga dengan "*Political Market*" artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamflet, selebarah bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan melalui program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna menyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.⁹⁵

Menurut rumusan penjelasan UU No. 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan umum, yang masih berlaku sampai tahun Pemilu 1997, disebutkan bahwa tujuan Pemilu adalah :

"Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan RI Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan Pemilihan umum. Dengan demikian diadakan pemilihan umum tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan /perwakilan, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan, mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan NKRI bersumber pada proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat. Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak

⁹⁵ A.Rahman. Op. Cit. Halaman 147

boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945”.

Pemerintah Orde Baru sangat menyadari bahwasanya Pemilu merupakan tonggak penting penyangga kekuasaan Orde Baru. Oleh karena itu Pemerintah Orde Baru sangat mempersiapkan kekuatan Golkar sebagai representatif pemerintah yg akan bertarung di Pemilu. Golkar yang dibackup penuh oleh ABRI dan pemerintah daerah tidak terlalu sulit dalam merangkul berbagai elemen masyarakat. Pembentukan LKAAM untuk kaum adat dan ICMI untuk kalangan intelektual muslim memperlihatkan bagaimana cara Orde Baru dalam mengkonsolidasikan elit dalam suatu wadah yang mudah di Kordinir.

Para panghulu yang bergabung dengan Golkar, baik itu sebagai pengurus Komisariat di Nagari dan kecamatan maupun yang hanya mejadi simpatisan Golkar di kerahkan dalam setiap tahap pemilihan umum. Panghulu tersebut mempunyai tugas untuk mendukung pembangunan dengan bentuk memenangkan Golkar dalam Pemilu. Dalam kenyataannya hal ini bukanlah tugas yang sulit untuk dilakukan oleh panghulu. Identitas yang melekat pada panghulu memudahkan mereka untuk mengajak masyarakat untuk memilih Golkar dalam Pemilu.

Pada saat Pemilu pertama Orde Baru 1971, panghulu dikerahkan untuk memenangkan Golkar di Kabupaten Agam. Panghulu yang berada pada barisan Golkar bekerja dengan mengajak *anak kemenakan* dan masyarakat dilingkungan nagari masing-masing untuk memilih Golkar. Ajakan ini bisa bersifat persuasif dan kadangkala ada juga panghulu yang memaksa, hal ini terungkap dalam wawancara penulis dengan DT. Maleka Nan Tinggi yang pada saat itu merupakan

seorang panghulu sekaligus Ketua Komisariat Golkar Kecamatan Palupuah. DT.

Maleka Nan Tinggi mengatakan :

“ Jikok ado masyarakat yang ndak amuah diajak untuak mamilih Golkar, kami hanyo mangęcekan seandainya terjadi apo-apo ka inyo kami ndak bertanggung jawab.”⁹⁶

(“Jika ada masyarakat yang tidak mau memilih Golkar, kami hanya mengatakan jika terjadi apa-apa kami tidak bertanggung jawab”.)

Jika dicermati kalimat tersebut mengandung ancaman secara halus pada masyarakat walaupun tidak secara gamblang disebutkan apa resiko yang akan didapatkan oleh mereka. Paling tidak ancaman ini mampu membuat masyarakat takut untuk melawan apa yang sudah diserukan kepada mereka.

Selain dalam tahapan kampanye, panghulu yang menjadi simpatisan Golkar juga ada sebagian yang bertugas sebagai panitia pemilihan umum pada saat pencoblosan. Pada tahapan ini acap kali terjadi panghulu yang merupakan kader Golkar berada pada dekat bilik suara dan kadang juga sampai mengantarkan pemilih sampai ke bilik suara sekaligus langsung melihat apa yang dicoblos oleh pemilih. Pada saat penghitungan suara, para panitia pemilihan dianjurkan untuk memanjangkan kuku mereka hal ini dilakukan untuk menusuk tanda lambang partai lain ketika kertas suara tersebut tidak untuk Golkar. Hal ini tentu berakibat hangusnya kertas suara yang ditunjukkan untuk Partai selain Golkar.

Jika melihat penjelasan tentang pemilu pada UU No.15 Tahun 1969 dan dibandingkan dengan apa yang terjadi dilapangan tentu jelas terlihat penyelewengan yang besar terhadap pasal ini dan anehnya tindakan kecurangan ini sangat terorganisir dari pemerintah daerah sampai ke elemen underbow

⁹⁶ Wawancara dengan DT. Maleka Nan Tinggi, anggota DPRD Kabupaten Agam (1987-1992, 1992-1997 dan Komisari Golkar Kec. Palupuah 1982-1993) pada tanggal 25 Juli 2012 jam 13.00

Golkar. Selain itu tidak ada tindakan preventif yang dilakukan oleh panitia pemilihan umum untuk mencegah terjadi kecurangan.

Sedangkan partai-partai selain Golkar yakni PPP dan PDI tidak memiliki akses untuk melakukan kecurangan. Kader-kader PPP dan PDI sangat diawasi gerak-geriknya ketika Pemilu. Untuk daerah Maninjau dan Tilatang kamang, PPP mampu berbicara dalam perolehan hasil Pemilu. Hal ini disebabkan oleh solidnya para pendukung tradisional PPP yang merupakan eks Partai Masyumi. Pendukung PPP diberi istilah "*Indak talok jo badia*", artinya mereka tidak takut akan ancaman Orde Baru. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam PPP ialah Manjas DT. Baso Balimo. Beliau merupakan orang keras dan kerap kali bertentangan dengan Thamrin DT. Panghulu Basa.⁹⁷

PDI merupakan satu-satunya partai yang sulit didaparkannya rekam jejak panghulu. PDI merupakan partai yang paling sedikit meloloskan kadernya dalam Pemilu Orde Baru. Dalam data yang penulis dapatkan, PDI hanya mampu meloloskan seorang kader di DPRD Kabupaten Agam pada periode 1992-1997 dengan nama Susilo MR. ST. Kayo. Stigma yang dibangun pada masa Orde Baru bahwa PDI merupakan jelmaan dari PKI dan partai sosialis yang anti agama berhasil mempengaruhi sebagian Masyarakat.⁹⁸

Hegemoni Golkar ini berlangsung dalam pemilu Orde Baru, keberhasilan Golkar dalam membangun Partai yang didukung oleh basis tradisional dan ABRI membuat Golkar menjadi partai yang kuat. Golkar menjadi sebuah momok bagi partai-partai lain yang menjadi kompetitornya. Walaupun dalam Prakteknya

⁹⁷ Wawancara dengan DT. Maleka Nan Tinggi, pada tanggal 25 Juli 2012 di Palupuah jam 13.00

⁹⁸ Wawancara dengan Patria Indra, pengurus DPC PDI-P kecamatan Tanjung Raya. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2012 jam 10.00

partai-partai lain yang menjadi kompetitornya. Walaupun dalam Prakteknya kemenangan Golkar tidak bisa dipisahkan dari manipulasi suara, intervensi dan kecurangan-kecurangan lain yang sengaja diorganisir untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Hal ini terbukti dengan berkuasanya Soeharto selama 32 tahun sampai akhirnya rezim otoritarian ini runtuh pada mei 1998 oleh gerakan massa rakyat bersama mahasiswa diberbagai Kota di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera barat sendiri.

Di bawah ini penulis menemukan dua buah tabel terkait jumlah perolehan suara pada dua pemilu di Kabupaten Agam yakninya (Pemilu 1977 dan Pemilu 1982). Sedangkan untuk data pada periode lainnya di zaman orde baru masih dalam proses pencirian.

Tabel 3 : Jumlah suara pada Pemilu 1977 daerah TK II Agam

NO.	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara	Persentase
1.	Golkar	91.672	53,8%
2.	PPP	77.555	45,5%
3.	PDI	1.230	0,01%

Sumber : Mestika Zed, et.al. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995.*

1998

Pada Pemilu 1977, Golkar berhasil menang di daerah yang dulunya menjadi basis partai Masyumi. Kita tahu para Tokoh Masyumi banyak yang berasal dari Kabupaten Agam. Kemenangan Golkar di Kabupaten Agam ini salah satunya disebabkan oleh berhasilnya Golkar dalam menghimpun para panghulu untuk mendukung Golkar dalam Pemilu. Selain itu Golkar juga mulai melakukan

kecurangan dalam penghitungan suara PPP yang dengan cara melobangi tanda gambar partai lain jika yang pilih itu selain Golkar.⁹⁹

PPP yang berhaluan hijau hanya memperoleh posisi kedua dalam perolahan suara, kekalahan PPP ini disebabkan oleh kegagalan PPP dalam mengorganisir masa dan beberapa kecurangan Golkar dalam Pemilu. Sedangkan PDI sudah diprediksi akan memperoleh suara yang minim di Kabupaten Agam karena stigma komunis yang sengaja dibangun kepada PDI berhasil mempengaruhi masyarakat. Selain itu dalam pemilu-pemilu sebelumnya partai-partai nasionalis kurang mendapat tempat dalam masyarakat kabupaten Agam.

Tabel 4 : Jumlah suara pada Pemilu 1982 Daerah TK II Kabupaten Agam

NO.	Nama Peserta Pemilu	Jumlah Suara	Persentase
1.	Golkar	92.325	51,5%
2.	PPP	85.840	47,9%
3.	PDI	1.097	0,01%

Sumber : Mestika Zed, et.al. Sumatera Barat di Panggung Sejarah Jakarta. 1998

Pada Pemilu 1982, Golkar kembali keluar sebagai pemenang mengalahkan PPP dan PDI. Dalam perolehan suara Pemilu 1982, perolehan suara Golkar turun secara persentase sebesar 2,3% namun naiknya secara perolehan jumlah pemilih sebanyak 653 orang dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Sedangkan PPP mengalami kenaikan jumlah suara secara persentase sebanyak 2,4% dan kenaikan yang cukup signifikan dalam hitungan jumlah pemilih sebanyak 8285 orang. PDI masih menjadi partai dengan perolehan terkecil dalam pemilu 1982 di Kabupaten

⁹⁹ Wawancara dengan Dt Maleka Nan Tinggi di Palupuah pada tanggal 25 Juli 2012 jam 13.00

Agam. Pemilu 1982 ini mengalami peningkatan jumlah pemilih jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

Terlihat pada dua tabel di atas, Golkar berhasil mengungguli PPP dan PDI dengan selisih yang sangat signifikan dalam pemilu 1977 dan 1982. Hal ini menunjukkan strategi menggunakan panghulu dalam proses politik berhasil memobilisasi masa rakyat untuk mendukung Golkar.

D. Hubungan Panghulu dengan Pemerintah

Setiap rezim memiliki cara tersendiri dalam menempatkan posisi panghulu dalam politik. Pada Massa Orde Lama sebagian besar panghulu tidak begitu dekat dengan pemerintahan. Peran panghulu hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perdata dan persoalan-persoalan yang melibatkan anak kemenakan dalam nagari.¹⁰⁰ Oleh karena itu sebagian dari panghulu minangkabau mencoba untuk menyalurkan hasrat politiknya dengan cara membentuk partai sendiri seperti Partai Adat Rakyat dan Partai MTKAAM. Partai yang mengarah pada isu primordial ini ternyata kalah dalam pemilu Orde Lama.

Pada massa Orde Baru, situasi politik berubah secara drastis. Dikeluarkannya Surat perintah sebelas maret (SUPERSEMAR) dan ditolakny laporan pertanggungjawaban Bung Karno oleh MPRS menjadi titik runtuhnya rezim Orde lama. Pemerintah Orde Baru yang dinahkodai oleh Soeharto mencoba untuk memperkuat pondasi rezim yang baru Soeharto dirikan. Soeharto mencoba menghimpun elemen-elemen masyarakat untuk bergabung dalam suatu wadah bersama yang dinamakan Sekber Golkar.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Syukirman DT.Tumbijo, Anggota DPRD Kabupaten Agam periode 1992-1997. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Januari 2012 jam 10.00 di Koto Tinggi.

Khusus untuk daerah Sumatera Barat, pemerintahan Orde baru sangat memahami makna *Tigo Tungku Sajarangan* yakni niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai sebagai pemimpin tradisional yang ada dalam Minangkabau. Pemerintah Orde Baru mencoba menghimpun panghulu dalam sebuah organisasi yang dinamai LKAAM. Organisasi ini sengaja dibentuk untuk menjadi corong politik Orde Baru kepada masyarakat. Untuk menjalankan roda organisasi, pemerintah Orde Baru memberi pendanaan penuh kepada lembaga ini.

Sementara itu di nagari-nagari Kabupaten Agam, panghulu mempunyai peran penting dalam menyukseskan program pemerintah. Salah satunya dalam menyukseskan program ABRI masuk desa (AMD). Sebelum diadakannya program AMD, pemerintah mendudukan panghulu dalam sebuah nagari atau kecamatan untuk membahas tentang teknis pelaksanaan. Panghulu diminta untuk mengerahkan masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam program AMD. Dalam hal ini panghulu sukses dalam menggalang masa untuk ikut dalam program AMD yang digalang oleh pemerintah. Tidak hanya dalam program AMD panghulu dilibatkan, semua program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Agama di Nagari tetap harus melibatkan panghulu didalamnya.

Harmonisnya hubungan panghulu dengan pemerintah juga tergambar dalam pengerahan panghulu yang tergabung dalam Golkar untuk melanggengkan pemerintahan Orde Baru dalam setiap pemilu. Panghulu yang dijadikan mitra strategis pemerintah untuk di nagari mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

E. Komposisi Panghulu dalam DPRD

Penulis akan menampilkan beberapa tabel yang berisi nama-nama anggota DPRD Kab.Agam dari berbagai periode pada zaman Orde Baru. Disini kita bisa melihat bagaimana komposisi panghulu dalam setiap periode yang ada.

Tabel ini penulis awali dari tahun 1982, sedangkan untuk tabel anggota DPRD dua periode sebelumnya tahun 1972-1982, penulis belum mendapatkan data-data tersebut secara rinci. Sebelumnya penulis sudah mengusahakan mencari ke Arsip Daerah Kabupaten Agam dan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam. Ketua DPRD Kabupaten Agam pada periode 1982 yakni Abdul Munir (1969-1977), Mhd.Nur Syaifei (1977-1980), Wagiran (1980-1982).

Tabel 5 : Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Agam
Periode Tahun 1982 – 1987

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	MTH. DT Panghulu Basa	FKP	Ketua
2.	Rami Rahmat	Fraksi ABRI	Wakil Ketua
3.	Dra. Suarni Adam	FKP	Sekretaris
4.	Anwar ST. Palimo	FKP	Anggota
5.	Musta'in	Fraksi ABRI	Anggota
6.	Drs. M. Halim Ahmad	Fraksi ABRI	Anggota
7.	Ilyas Noor	Fraksi ABRI	Anggota
8.	Toing Sukarna	Fraksi ABRI	Anggota
9.	Sarmin	Fraksi ABRI	Anggota
10.	Manjas DT. Baso Balimo	FPP	Anggota

11.	Ny. Sarifah	FPP	Anggota
12.	Nazaruddinba	FPP	Anggota
13.	Junaidi. Ms	FPP	Anggota
14.	Amin Apin Sutan Bagindo	FPP	Anggota
15	Darajat Daoed	FPP	Anggota
16.	Bukari DT. Tantuah	FPP	Anggota
17.	AR. DT. Maruhun	FPP	Anggota
18.	MY. DT. Rajo Nan Panjang	FKP	Anggota
19.	Asril Khaidir	FKP	Anggota
20.	Syafri DT. Sati NBA	FKP	Anggota
21.	Litafsir DT. Nan Panjang	FKP	Anggota
22.	Drs. Mahyudin Rahman	FKP	Anggota
23.	Suardi Mahmud	FKP	Anggota
24.	Erman DT. Rangkayo Basa	FKP	Anggota
25.	MHD. Faried Sulthany	FKP	Anggota
26.	M. DT. Rajo Nan Panjang	FKP	Anggota
27.	Awisk Harni Husin	FKP	Anggota
28.	Syahrial Bakri Syarif	FKP	Anggota
29.	H. Gazali Jalaludin	FKP	Anggota
30.	Nazir Yusuf	FKP	Anggota
31.	Syurkati	FKP	Anggota
32.	H. Chayar Hamzah	FKP	Anggota
33.	Syafuddin Maksum	FKP	Anggota

34.	Ny. H. Wafida	FKP	Anggota
35	M. Sabir, Bsc	FKP	Anggota
36.	H. Zubir DT. Pamuncak	FKP	Anggota
37.	Ny. Martalena Y	FKP	Anggota
38.	H. Rajumah Samad	FKP	Anggota
39.	Ny. Hayuda	FKP	Anggota

Sumber : Arsip DPRD Kabupaten Agam

Pada Tabel diatas terlihat dari total 39 anggota legislatif terdapat 10 Orang yang mempunyai latarbelakang panghulu. M. DT. Panghulu Basa menjadi Ketua DPRD Kabupaten Agam pertama yang bergelar panghulu. Jumlah yang cukup signifikan ini menggambarkan bahwa panghulu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat ketika menentukan sikap politik.

Tabel 6 : Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Agam

Periode Tahun 1987 – 1992

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	MTH. DT. Panghulu Basa	FKP	Ketua
2.	Alimin	Fraksi ABRI	Wakil Ketua
3.	Fachrudin DT. Andomo	FKP	Wakil Ketua
4.			Sekretaris
5.	Amir Sapin DT. Bagindo	*	Anggota
6.	Litafsir. DT. Nan Panjang	*	Anggota
7.	H. Syahbunan	*	Anggota
8.	Safar ST. Mudo	*	Anggota
9.	Mafdy	*	Anggota

10.	Rizalten	*	Anggota
11.	M. Faried Shultany	*	Anggota
12.	H. M. Dian	*	Anggota
13.	Jahimir DT. Rajo Panghulu	*	Anggota
14.	Syurkati	*	Anggota
15.	Drs. H. Djusair Rasyid	*	Anggota
16.	H. Syamsimar	*	Anggota
17.	Baharudin Arsyad	*	Anggota
18.	Yayah Hidayati	*	Anggota
19.	Syiekrudin St. Parapatiah	*	Anggota
20.	Yularnis Khatib	*	Anggota
21.	Elisnon Fauzi	*	Anggota
22.	Boestari, BA	*	Anggota
23.	Amarullah DT. Batuah	*	Anggota
24.	Achyar DT. Malano	*	Anggota
25.	H. Zubir Thalib DT. Pamuncak	*	Anggota
26.	Erman DT. Rangkayo Basa	*	Anggota
27.	H. Chayar Hamzah	*	Anggota
28.	Mawardi DT. Rajo Nan Panjang	*	Anggota
29.	Adifah	*	Anggota
30.	Drs. Imran R. DT. Mangunsati	*	Anggota
31.	Erma Salim	*	Anggota
32.	Syahrial Bakri Syarif	*	Anggota

33.	H. Djamaan	*	Anggota
34.	Djasman Antoni	*	Anggota
35.	Mujni Rinun	*	Anggota
36.	Nasmar	*	Anggota
37.	Toing Sukarna	*	Anggota
38.	Abdul Azis	*	Anggota
39.	Mulyadi	*	Anggota
40.	Saujaar	*	Anggota
41.	H. G. Jalaluddin	*	Anggota

Sumber : Arsip DPRD Kabupaten Agam

* tidak disebutkan fraksi

Pada tabel diatas terlihat dari 41 orang anggota DPRD Kabupaten Agam, 10 orang diantaranya adalah panghulu atau $\frac{1}{4}$ dari total keseluruhan kursi. Posisi ketua DPRD Kabupaten Agam pada periode ini masih M. DT. Panghulu Basa. Keberhasilan panghulu dalam menduduki lembaga DPRD Kabupaten Aga mini mempertegas posisi penting panghulu dalam politik Orde Baru di Kabupaten Agam.

Tabel 7 : Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Agam
Periode Tahun 1992 - 1997

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Gazali Jalaluddin	FKP	Ketua
2.	Alimin	Fraksi ABRI	Wakil Ketua
3.	Muslim Malin, BA	FKP	Sekretaris
4.	Gafar ST. Mudo	FKP	Wakil Ketua

5.	Rasuddin Astir	F.ABRI	Anggota
6.	Syahrial Rivai	F.ABRI	Anggota
7.	Syahminan	F.ABRI	Anggota
8.	Arsif	F.ABRI	Anggota
9.	Etty Saridin	F.ABRI	Anggota
10.	Apandi	F.ABRI	Anggota
11.	AR. DT. Maruhun	FPP	Anggota
12.	Asril Khaidir, BA	FPP	Anggota
13.	Tati AR Side	FPP	Anggota
14.	Tarnius ST. Makruf, SH	FPP	Anggota
15.	Susilo MR. ST. Kayo	F.PDI	Anggota
16.	Drs. Rivai Ramli	FKP	Anggota
17.	M. DT. Rajo Nan Panjang	FKP	Anggota
18.	Muzaha ST. Pamenan	FKP	Anggota
19.	Drs.Zakiruddin	FKP	Anggota
20.	Drs.Zirwan Nawawi	FKP	Anggota
21.	Hasan Basri	FKP	Anggota
22.	H. Sukarti	FKP	Anggota
23.	N. ST. Panji Alam	FKP	Anggota
24.	M. M. DT. Singo Marajo	FKP	Anggota
25.	Sukirman DT. Tumbijo	FKP	Anggota
26.	M. DT. Sati Nan Tuo	FKP	Anggota
27.	M. Sinin	FKP	Anggota

28.	YA. Tuanku Sajatino	FKP	Anggota
29.	M. N. H. Imam Marajo	FKP	Anggota
30.	D. DT. Sampono Labih, BA	FKP	Anggota
31.	Karti Ismail	FKP	Anggota
32.	A. DT. Bagindo Ali	FKP	Anggota
33.	S. Bakri Syarif	FKP	Anggota
34.	B. DT. Panduko Reno	FKP	Anggota
35.	E. Em. Aminah	FKP	Anggota
36.	Rosmiati	FKP	Anggota
37.	A. Khatib Malano	FKP	Anggota
38.	SH. DT. Mahimpuni	FKP	Anggota
39.	Martiyus PS. Bandaro	FKP	Anggota
40.	M. DJ. H. Rafki Tk Sutan	FKP	Anggota
41.	Dasni Saber	FKP	Anggota
42.	Nasmar	F.ABRI	Anggota

Sumber : Arsip DPRD Kabupaten Agam

Dari tabel diatas dapat dilihat dari total 42 orang anggota DPRD Kabupaten Agam, sembilan orang diantaranya adalah Panghulu. Pada Pemilu 1992, jumlah panhulu yang berada di Lemabaga DPRD Kabupaten Agam berkurang sebanyak satu orang, tetapi kesembilan orang panghulu yang berhasil duduk di DPRD Kabupaten Agam ini kesemuannya berasal dari Partai Golkar. Hal ini menunjukkan keberhasilan Golkar dalam mengeliminasi politisi panghulu yang berada pada PPP di daerah Kabupaten Agam.

Tabel 8 : Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Agam

Periode Tahun 1997 - 1999

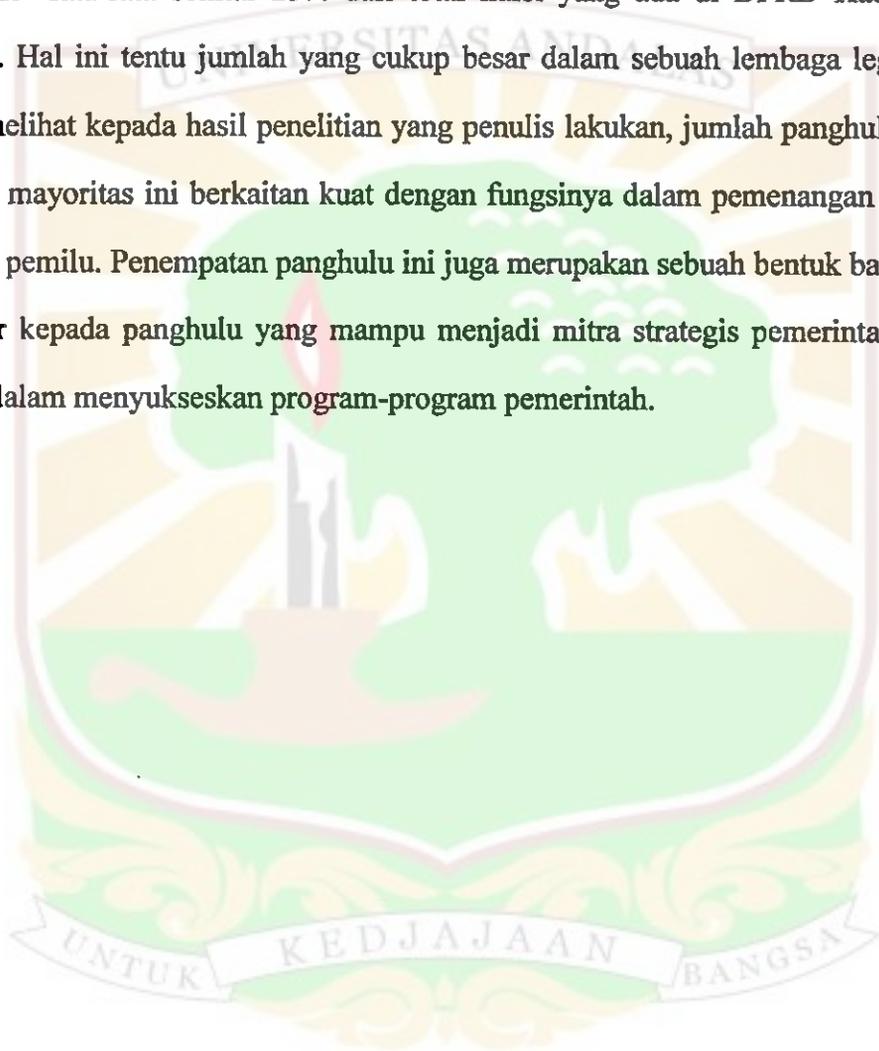
NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. Komaruddin	FKP	Ketua
2.	Alimin	Fraksi ABRI	Wakil Ketua
3.	Imam Arnis	FKP	Wakil Ketua
4.	Mugeni Rinun	FPP	Wakil Ketua
5.	H. Rustam Kamaruddin, BA	FPP	Sekretaris
6.	Asril Khaidir, BA	FPP	Anggota
7.	Mubasyir ST. Sati	FPP	Anggota
8.	Nasmar	Fraksi ABRI	Anggota
9.	D. Iskandar, SH	Fraksi ABRI	Anggota
10.	Noemartoyas	Fraksi ABRI	Anggota
11.	Haris Nasution	Fraksi ABRI	Anggota
12.	Drs. Djafar	Fraksi ABRI	Anggota
13.	M. Adni Yatim	Fraksi ABRI	Anggota
14.	Djasmi Hasman	Fraksi ABRI	Anggota
15.	H. Anwar Maksum	FKP	Anggota
16.	Dra. Suarni Adam	FKP	Anggota
17.	AR. Yutinof	FKP	Anggota
18.	Martiyus DT. Bandaro	FKP	Anggota
19.	Drs. Nofrizal Usra	FKP	Anggota
20.	Matiswar	FKP	Anggota

21.	Drs. Rivai Ramli	FKP	Anggota
22.	Drs. Zakiruddin	FKP	Anggota
23.	Muslim Malin, BA	FKP	Anggota
24.	Rosmiati	FKP	Anggota
25.	Sukirman Dt. Tumbijo	FKP	Anggota
26.	Zulkifli Hamin	FKP	Anggota
27.	Asmayetti Salman	FKP	Anggota
28.	Abdullah Siddik	FKP	Anggota
29.	M. Baron DT. Kayo	FKP	Anggota
30.	Syahrial DT. Sariaga	FKP	Anggota
31.	Drs. Anwar Ali Akbar Dt. Rajo Harimau	FKP	Anggota
32.	M. DJ. H. Rafki Tk. Sutan	FKP	Anggota
33.	Syahrial Bakri Syarif	FKP	Anggota
34.	Zainuddin Al Zoel	FKP	Anggota
35.	Abd. Muis DT. Bandaro	FKP	Anggota
36.	Basyaruddin	FKP	Anggota
37.	Darnil Darwis	FKP	Anggota
28.	Rajulis	FKP	Anggota
39.	MA. DT. Simarajo	FKP	Anggota
40.	Syamsir Alam DT. Rajo Panghulu	FKP	Anggota
41.	Djahimir DT. Rajo Panghulu	FKP	Anggota
42.	ER. Jalis Malin Mudo	FKP	Anggota
43.	Asmir DT Bagindo Ali	FKP	Anggota

Sumber : Arsip DPRD Kabupaten Agam

Dari Tabel diatas dapat dilihat dari total 43 orang anggota DPRD Kabupaten Agam, 10 orang diantaranya adalah panghulu. Pada Pemilu yang merupakan masa runtuhnya Orde Baru tidak membuat panghulu kehilangan posisi di DPRD Kabupaten Agam, buktinya panghulu masih bisa menduduki 10 kursi.

Dari beberapa data yg ditampilkan diatas jelas terlihat posisi panghulu mengisi rata-rata sekitar 25% dari total kursi yang ada di DPRD Kabupaten Agam. Hal ini tentu jumlah yang cukup besar dalam sebuah lembaga legislatif. Jika melihat kepada hasil penelitian yang penulis lakukan, jumlah panghulu yang cukup mayoritas ini berkaitan kuat dengan fungsinya dalam kemenangan Golkar dalam pemilu. Penempatan panghulu ini juga merupakan sebuah bentuk balas jasa Golkar kepada panghulu yang mampu menjadi mitra strategis pemerintah Orde Baru dalam menyelesaikan program-program pemerintah.



BAB IV

**DAMPAK KETERLIBATAN PANGHULU DALAM POLITIK ORDE
BARU DI KABUPATEN AGAM**

A. Dampak dalam Bidang Pembangunan

Keterlibatan panghulu dalam politik Orde Baru berdampak positif dalam pembangunan nagari yang menjadi daerah tempat tinggal panghulu yang duduk di lembaga legislatif. Salah satu contoh kasusnya adalah di Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya, dimana pada saat itu S. Dt. Tumbijo menjadi salah satu anggota legislatif. Menurut Beliau, pada saat itu jalan menuju kediaman beliau di Jorong Koto Tinggi sebelumnya adalah jalan kerikil dan berlobang, tetapi dengan adanya beliau dalam DPRD Kabupaten Agam maka tidak begitu sulit bisa mengarahkan pembangunan jalan ke nagari duo koto. Saat ini jalan nagari duo koto, terutama jorong Koto Tinggi telah diaspal.¹⁰¹

Jika kita melihat kasus ini bisa di jelaskan kalau keterlibatan panghulu dalam Politik Orde Baru mempunyai manfaat dari sisi pembangunan bagi daerah sekitar kediaman beliau. Pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat yang berada di daerah dekat dengan kediaman panghulu sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Menurut penulis, kasus ini memperlihatkan kalau kesewenang-wenangan dalam mengatur politik anggaran pembangunan terjadi dalam DPRD di masa Orde baru. Seharusnya seorang anggota dewan ketika berada di DPRD tidak lagi memikirkan kepentingan pribadi tetapi harus lebih memperhatikan masyarakat secara luas.

¹⁰¹ Wawancara dengan Syukirman Dt. Tumbijo Pada 29 Januari di Koto Tinggi jam 10.00-11.30

B. Dalam Bidang Politik

Ikutnya panghulu dalam percaturan politik Orde Baru di Kabupaten Agam juga berimbas pada konstelasi politik di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam yang dulunya merupakan salah satu daerah basis Partai Masyumi, perlahan-lahan mulai *menguning*. Para panghulu yang mempunyai afiliasi partai, langsung turun ke masyarakat untuk mengarahkan anak dan kemenakan untuk memilih Golkar. Panghulu tidak segan-segan untuk masuk dari rumah kerumah dan berbicara di depan orang banyak untuk mengajak pemilih memilih Golkar. Hasilnya pada tahun 1977, Golkar berhasil meraup suara 53,8%.¹⁰²

Keberhasilan panghulu dalam memenangkan Partai Golkar berdampak pada banyaknya panghulu yang duduk di lembaga legislative di Kabupaten Agam. Jika di lihat dalam periode 1982-1999, panghulu menduduki rata-rata 25% kursi yang ada dalam DPRD Kabupaten Agam.¹⁰³

Bergabungnya panghulu dalam partai juga memunculkan kompetisi antar panghulu. Panghulu yang berada di Golkar mencoba mempengaruhi panghulu-panghulu yang berada di PPP untuk pindah ke Golkar dengan berbagai macam cara. Hal ini di beberapa kecamatan berhasil membuat panghulu-panghulu yang dulunya berpihak pada PPP menyebrang ke Golkar atau tidak mau ikut campur dalam Politik. Namun untuk daerah Maninjau dan Tilatang Kamang, para panghulu yang berasal dari PPP ini tidak bisa diajak untuk pindah ke Partai Golkar. Karena keteguhan yang kuat terhadap pilihan politik yang telah di ambil.¹⁰⁴

¹⁰² Wawancara dengan Dt. Maleka Nan Tinggi di Palupuah tanggal 25 Juli 2012 jam 13.00

¹⁰³ Arsip DPRD Sumbar 2012

¹⁰⁴ Wawancara dengan Dt. Maleka Nan Tinggi di Palupuh tanggal 25 Juli 2012 jam 13.00

C. Dalam Bidang Pemerintahan

Keterlibatan Panghulu dalam Politik Orde baru juga berdampak pada bidang pemerintahan. Pemerintah Orde Baru di Kabupaten Agam menjadikan panghulu sebagai alat untuk melegitimasi program dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Panghulu dijadikan sebagai media yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat di nagari-nagari, sehingga hal ini memudahkan pemerintah untuk turun ke masyarakat. Salah satu contoh kasusnya ialah ketika pada tahun 1983, pemerintah Kabupaten Agam akan melaksanakan program ABRI masuk desa (AMD) di Kecamatan Palembayan. Pada waktu itu pemerintah mengajak panghulu untuk terlebih dahulu mendiskusikan program tersebut. Setelah itu barulah program AMD ini dijalankan oleh pemerintah.¹⁰⁵

Panghulu-panghulu yang berada di dalam DPRD Kabupaten Agam yang seharusnya menjadi alat untuk mengontrol kekuasaan malah sebaliknya juga menjadi corong bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program dan kebijakan kepada masyarakat. Sehingga proses *Check and balance* yang harusnya terjadi antara lembaga eksekutif dengan legislatif tidak terlihat dalam pemerintahan Kabupaten Agam.

Kondisi ini sebenarnya tidak aneh lagi jika terjadi dalam pemerintah Orde Baru yang menganut sistem otoritarianisme. Pemerintah bisa melakukan apa saja untuk menjalankan kebijakan yang di keluarkan, termasuk menjadikan DPRD sebagai salah satu lembaga yang mendukung pemerintah dan menjadi alat untuk melegitimasi kebijakan pemerintah.

¹⁰⁵ Wawancara dengan M. Dt. Sati Nan Tuo di Palembayan tanggal 5 Juli 2012 jam 13.30

D. Dalam bidang Budaya

Panghulu merupakan sebuah sebutan sebagai seseorang yang dianggap pemimpin dalam kaum. Sehingga tugas pokok seorang panghulu ialah mengurus persoalan-persoalan adat dan membimbing anak-kemenakan untuk menjalankan adat serta menyelesaikan pertikaian yang terjadi didalam kau. Namun, ketika panghulu masuk pada jaringan kekuasaan baik itu sebagai actor yang berada di lembaga-lembaga pemerintahan maupun hanya sebagai seorang kader dari partai politik maka fungsi tradisional seorang panghulu akan mulai tergerus.

Dt. Maleka Nan Tinggi mengungkapkan, rusaknya adat Minangkabau salah satunya disebabkan oleh panghulu dekat dan ikut dalam politik. Kedekatan panghulu dengan politik ini mengakibatkan, panghulu lupa dengan tugas dan kewajiban dalam mengurus anak kemenakan dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan anak kemenakan merasa tidak lagi mempunyai orang-orang yang menjadi panutan dalam soal adat yang akhirnya membuat mereka tidak beradat.¹⁰⁶ Bahkan sering terjadi pertengkaran antara panghulu dan kemenakan terkait dengan pilihan terhadap partai politik.

Penggunaan posisi sebagai seorang pimpinan adat untuk memobilisasi masa dalam memilih partai tertentu, merupakan sebuah pelanggaran sumpah panghulu. Panghulu yang seharusnya menjadi pemimpin yang arif bijaksana dan mengayomi seluruh anak kemenakan tanpa melihat latar belakang politik berubah menjadi seorang pragmatis yang mengutamakan kepentingan pribadi. Jika perilaku ini terus dilakukan oleh panghulu dalam masa ke masa tentu peran panghulu dalam masyarakat akan di anggap remeh dan bahkan di sepelekan, akhirnya nanti cerita tentang panghulu yang mengayomi anak kemenakan hanya menjadi cerita lama yang tidak akan ditemukan lagi pada masa-masa selanjutnya.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Dt. Maleka Nan Tinggi di Palupuh tanggal 25 juli 2012 jam 13.00

BAB IV

KESIMPULAN

Panghulu merupakan salah satu dari elit tradisional Minangkabau yang dilambangkan istilah "*Tungku tigo sajarangan*". Panghulu adalah *andiko* dari kaumnya atau raja dari kemenakannya, yang berpungsi sebagai kepala pemerintahan dan menjadi pemimpin, menjadi hakim dan pendamai di dalam kaumnya. Ia juga menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang terluar. Dalam realitanya panghulu merupakan sosok yang dihormati di dalam masyarakat Minangkabau.

Persentuhan panghulu dan politik sudah terjadi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan dan berlanjut pada tiap tahap pemerintahan pasca Indonesia merdeka. Panghulu yang menjadi bagian dari elit tradisional Minangkabau memiliki posisi yang tinggi ditengah masyarakat sehingga memudahkan mereka dalam bergerak ditengah masyarakat. Jika dilihat dari rentang waktu tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait hubungan panghulu dengan politik.

Pertama panghulu cenderung pragmatis dengan kekuasaan Politik. Hal ini terlihat dengan sikap yang diambil oleh panghulu sejak dari Zaman Belanda sampai dengan Orde Baru. Sebagian besar panghulu menjadi bagian dari pemerintahan yang ada, baik itu Belanda, Jepang dan Orde Baru. Selain itu pada Zaman pemerintahan Belanda nyaris tidak ada gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan oleh panghulu kepada Belanda, kecuali perlawanan yang dilakukan oleh Raja Alam Bagagarsyah kepada Belanda. Namun perlawanan ini dilakukan

setelah sebelumnya Raja Alam Bagagarsyah bersekutu dengan Belanda untuk menghancurkan gerakan Paderi.

Kedua, panghulu cenderung sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah . Posisi panghulu yang strategis dalam masyarakat ini dimanfaatkan oleh penguasa untuk menyukseskan program dan kebijakan yang diambil ditingkat pusat maupun kabupaten. Dengan adanya *back up* oleh panghulu maka pelaksanaan kebijakan di tingkatan nagari menjadi mudah. Prinsipnya, mengajak panghulu untuk bersepakat berarti juga telah membuat anak kemenakan panghulu juga ikut sepakat.

Ketiga, keterlibatan panghulu dalam politik berdampak pada tergerusnya adat Minangkabau. Panghulu yang seharusnya memimpin kaum dengan kebijaksanaan malah sebaliknya menjadikan kaum sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar di pemerintahan. Hasilnya urusan-urusan adat menjadi terbengkalai, sehingga membuat Adat Minangkabau perlahan mulai pudar dalam kehidupan bermasyarakat. Bergabungnya panghulu dalam politik juga membuat tidak terurusnya anak kemenakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang pangulu

Keempat, panghulu berperan dalam kemenangan Golkar di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata 25% panghulu yang duduk dilembaga legislatif. Salah satu strategi Golkar yang mencoba menghimpun para panghulu kedalam partai Golkar adalah memberikan posisi sebagai utusan golongan dengan unsure kekaryaan. Selain itu LKAAM berhasil memberikan kemenangan besar pada Golkar di Sumatera Barat. Dengan bantuan panghulu yang menjadi juru

kampanye, Golkar leluasa masuk ke nagari-nagari di Kabuapten Agam untuk menyosialisasikan program-program yang mereka tawarkan.

Kondisi saat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Panghulu masih menjadi sosok yang ingin dekat kekuasaan. Kondisi ini diperparah dengan adanya jual-beli dalam memperoleh gelar panghulu. Tidak jarang kita lihat, para calon kepala daerah berlomba-lomba mengejar gelar “Datuk” sebelum diadakannya Pemilu dengan harapan gelar adat ini bisa mempengaruhi konstituen untuk memilih mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anwar, Doni Ansyah P. dkk, 1995. *Profil Tokoh, Aktifis, dan Pemuka Masyarakat Minang*. PT. Permo Promotion, Jakarta.
- Asnan, Gusti. 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*. Citra Pustaka: Yogyakarta
- Bappeda Kabupaten Agam. 2012. *Agam dalam angka 2012*. Bappeda Kabupaten Agam :
- Biro Humas Komisi Pemilihan Umum. 2000. *Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta tahun 1955-1999*. Biro Humas : Jakarta.
- Claessen. 1987. *Antropologi Politik: Suatu Orientasi*. Erlangga : Jakarta.
- Duverger. 1982. *Sosiologi Politik*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Pustaka Jaya : Jakarta.
- Gottshalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press : Jakarta.
- Graves, Elizabeth E. 2007. *Asal Usul Elit Minangkabau Modern "Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX"*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Hasan dan Koentjaraningrat, 1977. *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah*. PT. Gramedia : Jakarta.
- Kahin, Audrey. 2008. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Kahin, Audrey. 1997. *"Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950"*. MSI Cabang Sumatera Barat: Sumatera Barat :
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Beberapa Dimensi Birokrasi dan Profesionalisme Indonesia dalam Perspektif Sejarah dalam Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. UGM Press, 1987 : Yogyakarta.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia: Jakarta.

- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Prespektif Sejarah*. Balai Pustaka: Jakarta
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. PT. Tiara Wacana : Yogyakarta
- M.S, Amir. 2003. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. PT. Mutiara Sumber Widya : Jakarta
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*. Pustaka Eureka : Surabaya.
- Navis, AA. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. PT. Graviti Pers : Jakarta
- Noer, Deliar. 1995. *Tradisi Kekerasan Politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metode Sejarah*. Ombak : Yogyakarta.
- Soltau, Roger F. 1991. *The Study Of Politic (Sosiologi politik)*. Rajawali : Jakarta
- Suhartono, dkk. 2003. *Parlemen. Desa: Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*. Laperia Pustaka Utama : Yogyakarta.
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Sinar Harapan : Jakarta.
- Syafrizal, dkk. 2010. Jurnal analisis Sejarah “*Ninik-mamak dalam perubahan Politik Di Sumatera Barat pada awal Orde baru*”. Labor Sejarah Universitas Andalas: Padang
- Varma, S.P. 1987. *Teori Politik Modern*. Rajawali Pers : Jakarta. Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Sinar Harapan : Jakarta.
- Zuhro, Siti. 2009. *Demokrasi Lokal, Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Penerbit Ombak : Yogyakarta.

Skripsi dan Makalah

- Muhammad, Wan Anwar Wan. 1992. “*Serikat Adat Alam Minangkabau : Keberadaan Sebagai Sebuah Organisasi dan Perjuangan Mempertahankan Adat Minangkabau (1916-1935)*”, Fakultas Sastra Universitas Andalas: Padang Makalah
- Rais Dt.Simulie, H.Karmadi. 2007. *Cuplikan sejarah singkat lahirnya LKAAM Sumbar*. Padang

Yesmawati, "*Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat 1966-2004*", Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2006).

Arsip Koran

Haluan, 10 Juni 1971.



DAFTAR WAWANCARA

1. Nama : Saafroedin Bahar
Umur : 73 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan TNI
Alamat : Kebayoran Lama Jakarta
Tanggal Wawancara : 14 Oktober 2012
Pukul : 13.00
2. Nama : Yul Arnis Dt. Maleka Nan Tinggi
Umur : 67 Tahun
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Agam
Alamat : Nagari Batang Palupuah
Tanggal Wawancara : 25 Juli 2012
Pukul : 13.00
3. Nama : Muntasir Dt. Sati Nan Tuo
Umur : 77 Tahun
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Agam
Alamat : Palembayan
Tanggal Wawancara : 9 Juli 2012
Pukul : 13.30
4. Nama : Syukirman Dt. Tumbijo
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Agam
Alamat : Koto Tinggi
Tanggal Wawancara : 20 Mei 2012
Pukul : 09.00

5. Nama : M. DT. Nan Panjang
Umur : 73 Tahun
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Agam
Alamat : Palembang
Tanggal Wawancara : 22 Juli 2012
Pukul : 13.00
6. Nama : Patria Indra
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Pengurus PDI-P Kec. Tj. Raya
Alamat : Bayua
Tanggal Wawancara : 18 Juli 2012
Pukul : 20.00
7. Nama : Erman
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Pengurus PPP Kabupaten Agam
Alamat : Sugai puar
Tanggal Wawancara : 12 Agustus 2012
Pukul : 16.00
8. Nama : Herman St. Mudo
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Matur
Tanggal Wawancara : 13 Agustus 2012
Pukul : 20.00

9. Nama : Susilo Suyan Kayo
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Agam
Alamat : Biaro Selatan
Tanggal Wawancara : 25 Agustus 2012

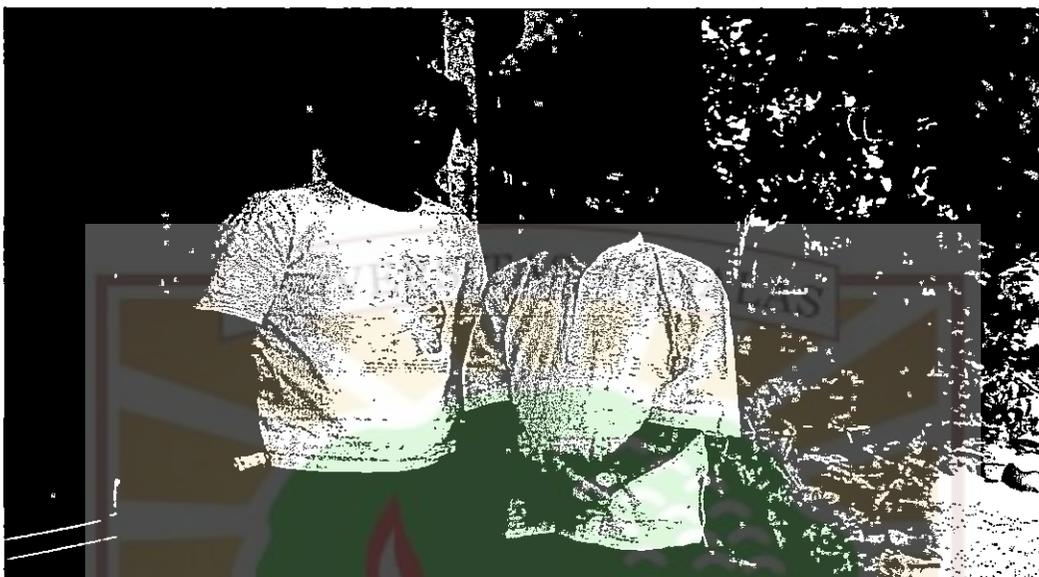
Pukul : 14.00

10. Nama : Arman ST. Pamenan
Umur : 67 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Baso
Tanggal Wawancara : 25 Agustus 2012
Pukul : 10.00

11. Nama : Rustam ST. Sati
Umur : 71 Tahun
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Gaduik
Tanggal Wawancara : 25 Agustus
Pukul : 17.00

Lampiran I

Foto bersama Saafroedin Bahar, setelah melakukan wawancara.



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, diambil tanggal 14 Agustus 2012 di Jakarta

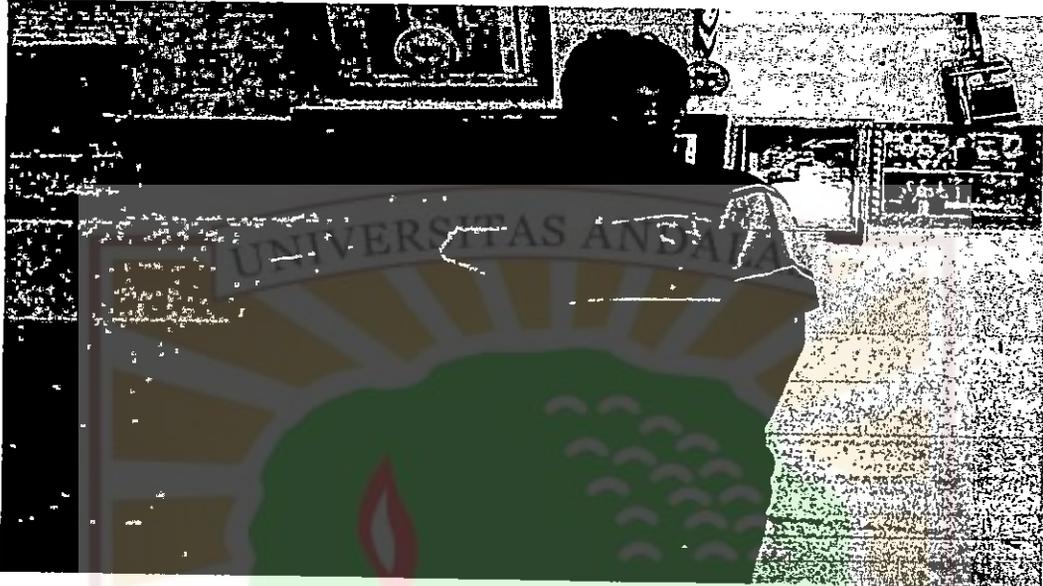
Foto Bersama Dt. Sati Nan Tuo, setelah melakukan wawancara



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, diambil tanggal 9 Juli 2012 di Palembang

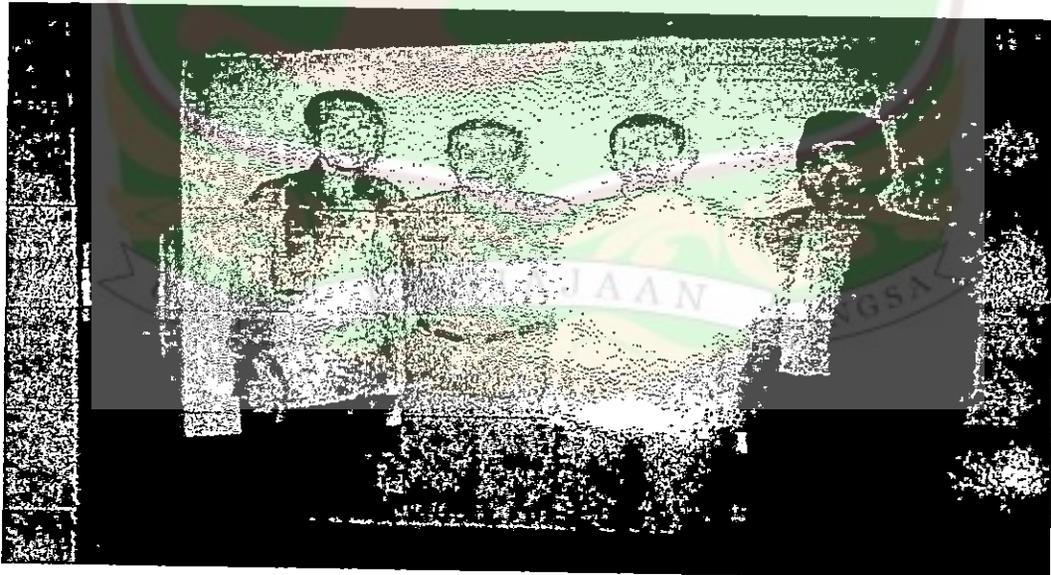
Lampiran 2

Foto bersama Yul Arnis Dt. Maleka Nan Tinggi, setelah melakukan wawancara.



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, diambil pada tanggal 25 Juli 2012 di Palupuah.

Foto Yul Arnis Dt. Maleka Nan Tinggi Bersama Muspida Kabupaten Agam



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, diambil tanggal 25 Juli 2012

Lampiran 3

Foto Yul Arnis Dt. Maleka Nan Tinggi bersama Presiden Soeharto tahun 1992



Foto Yul Arnis Dt. Maleka Nan Tinggi bersama Wapres Hamzah Haz dalam acara Perti tahun 2000



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, diambil tanggal 22 Juli 2012



No. 19409/BP-7-SB/1995

UNIVERSITAS ANDALAS

Hiagam

BADAN PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (BP-7) DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yul Annis M. Maleka Mar Jangg

Tempat/Tgl. Lahir : Sitinjalat, 17 Agustus 1949

Nomor Pokok Peserta : 031201993

Instansi/Organisasi : DPPD Agam

Fangkat/Jabatan : Sekretaris Komisi A

Alamat : KM. 1.8 A. Raya B. Tinggi Medan Pra-16
Pulauh Agam

Telah mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Pola 120 Jam Angkatan XXII yang diselenggarakan oleh BP-7 Daerah Tingkat I Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 dan Keputusan Gubernur KDH T. Sumatera Barat No. 38/893.3/BP-7-SB/95 di Padang dari tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 1995 dengan hasil :



Padang, 14 September 1995
KEPALA BP-7 DATI I SUMATERA BARAT

H. BAHAROEDDIN KHATIB, SH

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010020715



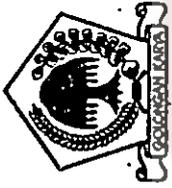
DR. ALBERT G. BURMAN

I hereby certify that
 the within and foregoing
 is a true and correct
 copy of the original
 as the same appears
 from the records
 of the
 State of
 California
 this 1st day of
 August 1908
 at the City of
 Sacramento
 J. W. [Name]

State of California

ROBERT R. BURMAN, DEPUTY REGISTRAR, AGENT





**SURAT TANDA PENGHARGAAN
PENSUKSESAN PEMILU 1997**

BUPATI KDH. TK.II AGAM

**SELAKU
KETUA DEWAN PENASEHAT GOLKAR
TK.II AGAM**

**MEMBERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA:**

YA. DT. MALEKANAN TINGGI

**ATAS PARTISIPASINYA UNTUK
MEMENANGKAN GOLKAR DALAM
PEMILU 1997**

**LUBUK BASUNG JULI 1997
KETUA DEWAN PENASEHAT GOLKAR TK.II AGAM**

(Handwritten signature)

ISMU NAZIF



Piagam Penghargaan

Menteri Dalam Negeri/Ketua
Lembaga Pemilihan Umum

Dengan ini memberikan penghargaan dan menyampaikan
ucapan terima kasih kepada :

YA. PT. MALEKA NTINGGI

*Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS)*

atas pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya dalam
rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997.

Jakarta, 7 Juli 1997



Menteri Dalam Negeri/Ketua
Lembaga Pemilihan Umum

MOH. YOGIE S.M.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I
GOLONGAN KARYA SUMATERA BARAT**

" PIAGAM PENGHARGAAN "

Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Golongan Karya Sumatera Barat dengan ini menyampaikan penghargaan kepada :

YUL ARNIS KATIB PUTIH

Yang telah mengikuti PEKAN ORIENTASI Calon Terpilih Anggota FKP DPRD Tingkat I dan Tingkat II se Sumatera Barat dari tanggal 12 -14 Juli 1992 di Padang.

Padang, 14 Juli 1992

**DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I
GOLONGAN KARYA SUMATERA BARAT**

Ketua,

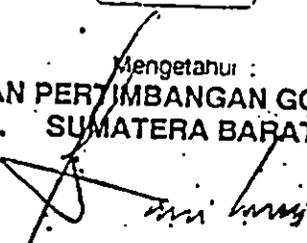

PROF. DRs. JAMIL BAKAR
NPAG. 0301000017

Sekretaris,

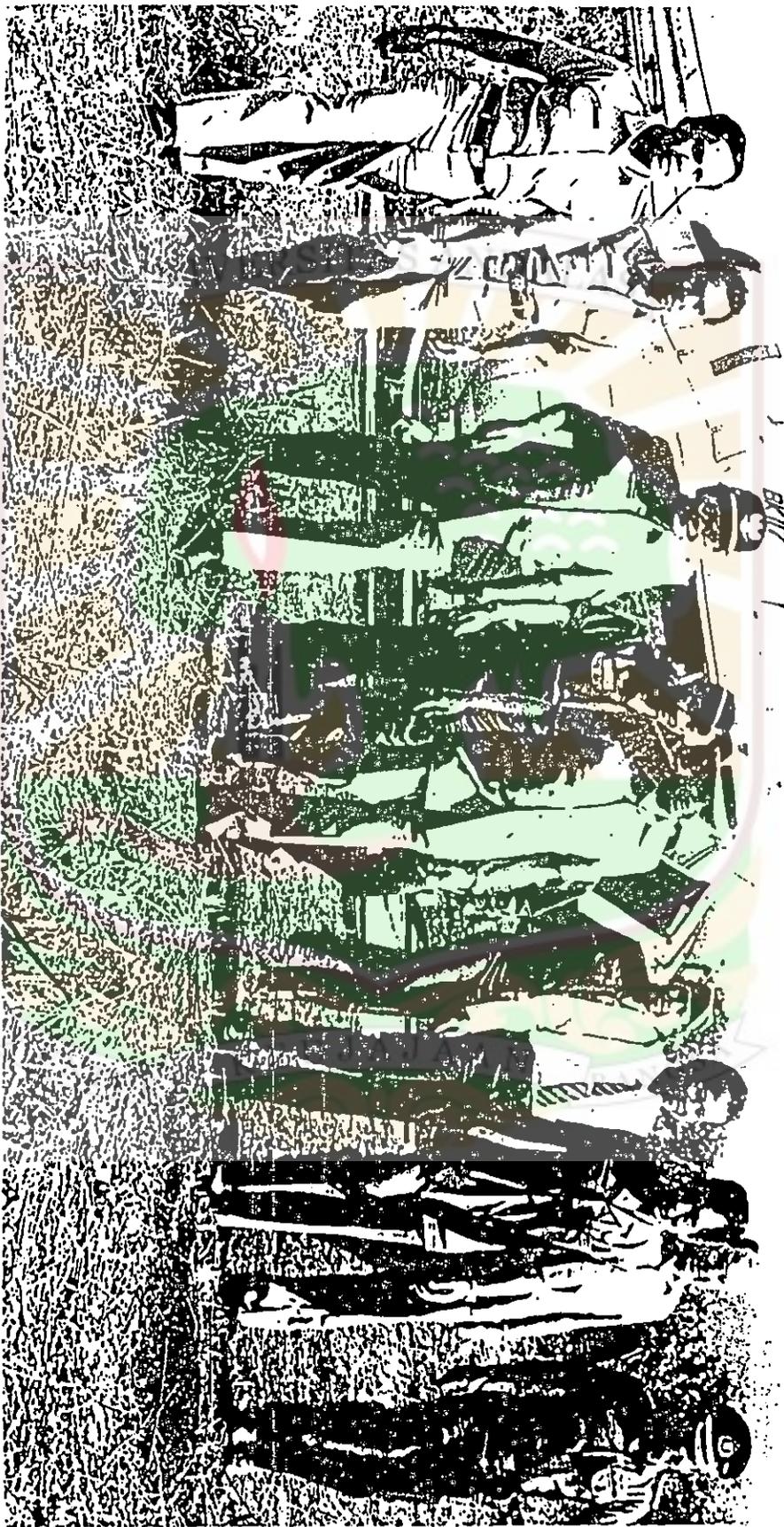

S. M. TAUFIQ THAIB SH
NPAG. 03010000121



Mengetahui :
**KETUA DEWAN PERTIMBANGAN GOLONGAN KARYA
SUMATERA BARAT**


DRS. H. HASAN BASRI DURIN
NPAG. 03010000008





DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT II
GOLONGAN KARYA KABUPATEN AGAM

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 229 / DPD - AG / IX / 1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Golongan Karya Kabupaten
Agam, dengan ini memberikan penghargaan kepada :

NAMA : ALIMAH NAN TINGGI

N.P.A.G. : 0-03000043

UNSUR : KOROSMA-SIAL

ALAMAT : DESA BATANG PALUPUH

NAGARI KOTAJANTANG

KEC. PALUPUH

DALAM RANGKA : MENGIKUTI BENJELASAN / PENYEGAR-
AN KADER SOLKAR TINGKAT II-KABU-
PATEN AGAM PADA TANGGAL 8 s/d 10
SEPTEMBER 1994 DI BUKITINGGI

GOLONGAN KARYA

Dikeluarkan di : BUKITINGGI

Pada tanggal : 10 September 1994

DPD TINGKAT II GOLONGAN KARYA
KABUPATEN AGAM

DEWAN PIMPINAN DAERAH

**GOLONGAN
KARYA**

Sekretaris,

= A L I M I N = Dr. ASMAIDI AS, SH =

NPAG. 0303000043

NPAG. 03030006785

UNIVERSITAS ANDALAS
ANGGOTA D.F.R.D. II. KABUPATEN AGUNG
MASA BAKTI .1987-1992. DOB 82-97

